

E-newsletter

NOVEMBER | 2020

**PKSPARLEMEN**

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# FPKS PROTES KERAS MACRON



# ‘Unforced Error’ Bernegara

Sebuah Undang-Undang mengalami revisi berulang kali pasca diparipurnakan dan ironisnya setelah disematkan nomer serta tanda tangan masih salah juga. Bukan sekedar typo minor, tapi hingga subtansi mayor. Namun untuk kesekian kali melakukannya ‘unforced error’ pemegang tampuk kuasa tampak tidak punya sensitifitas rasa malu dan justru menganggap biasa-biasa saja, bahkan mendorong menjadi ‘kebiasaan’. Its new normal, sad!

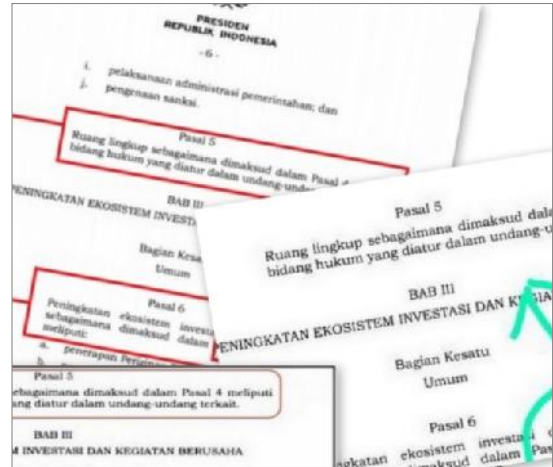
Kerja bernegara sejatinya bukan kerja sembarangan dan “kaleng-kaleng”, atas dasar itu pemilihan orang yang ada di dalamnya berjenjang, rijit dan cenderung berbelit belit. Memilih kepala negara dengan syarat berlapis, memilih pejabat negara dengan fit and proper test, melakukan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan melewati sejumlah tahapan. Ihwal dari proses panjang itu sesungguhnya mencari yang terbaik dari yang terbaik, karena akan mengambil peran dan tanggung jawab yang tidak ringan. Agar yang terpilih tersebut mampu menyederhanakan apa yang rumit, sehingga publik

mendapat manfaat besar atas terobosan mereka. Tapi apa yang terjadi saat ini sungguh diluar kebiasaan dan kelaziman kehidupan bernegara, berulang kali kita menemukan unforced error atau unforced error dalam tranlasi Bahasa Indonesia bermakna “kesalahan sendiri”. Sebuah Perppu dikeluarkan bukan karena kegentingan yang memaksa, namun karena ketidakberdayaan kerja kabinet. Sebuah Undang-Undang mengalami revisi berulang kali pasca diparipurnakan dan ironisnya setelah disematkan nomer serta tanda tangan masih salah juga. Bukan sekedar typo minor, tapi hingga

subtansi mayor. Namun untuk kesekian kali melakukan ‘unforced error’ pemegang tampuk kuasa tampak tidak punya sensitifitas rasa malu dan justru menganggap biasa-biasa saja, bahkan mendorong menjadi ‘kebiasaan’. Its new normal, sad!

Pada akhirnya kita seringkali mengenyitkan dahi, jika pada hal yang subtansi dan kasat mata saja penampak otoritas lalai bagaimana pada kebijakan yang tidak kasat mata: bisa lebih lalai. Saat kuasa mendera dan tampuk singsana direngkuh memang sebuah kesalahan seakan sirna, karena terlalu banyak penasihat yang puja puji penuh narasi. Hingga pada akhirnya kita bisa mengelus dada saat ada buronan keluar masuk kantor negara, diantaranya dan dijamu dengan luar biasa. Berbekal kawalan dan bekingan, sungguh pentas yang terlalu vulgar dipertontonkan.

Jika situasi ini terus dikembangkan, diwariskan dan berlangsung menaruh maka bukan tidak mungkin akan berdampak sistemik merusak tatanan kebaikan. Hukum alam selalu berkerja dengan sempurna, meski cenderung lambat. Hidup ini sesungguhnya siklus yang tak bertepi karena adanya kita maka karena ada



orang lain. Rusaknyaalur sistem pada satu hal maka akan mempengaruhi keseluruhan ekosistem. Keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan berkepanjangan, maka segenap civil society, patriotic, key opinion leader, public dan activist harus mendorong ‘lonceng pengingat ditabuh lebih keras’. Pengingat yang baik bukan hanya cermat dalam melihat kesalahan, namun juga teman yang serius menawarkan solusi. Ikhtiar sekecil apapun harus dilakukan, tidak boleh terpengaruh oleh jumlah kursi dan peserta koalisi. Kerja besar

ini harus dilakukan dalam kerangka yang utuh, maka sebuah peristiwa tidak boleh dikeskikan hanya karena masih ada yang dibiarkan bicara saat yang lain mulai ditanggapi. Kita sedang menghadapi ancaman demokrasi yang sangat serius. Demokrasi hari ini adalah perjuangan gerakan reformasi, bukan hadiah dari seseorang yang tidak pernah ikut berdemotransi. Bukan sekedar retorika rindu di demo. Kita harus jaga dengan nalar dan hati yang bersih, karena kita ingin anacuk kita meariskan kebanggaan bukan sekedar kebrokran.

Fraksi PKS mengecam pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang mendukung penerbitan kartun penghinaan kepada Nabi Muhammad. Karenanya Fraksi PKS telah mengirim surat resmi protes kepada Presiden Perancis lewat Duta Besarnya di Jakarta. Selain itu, Fraksi PKS mendukung sikap tegas Kemenlu yang telah memanggil Duta Besar Perancis untuk Indonesia guna menyampaikan kecaman atas pernyataan Presidennya.

## FRAKSI PKS DPR RI

# Kecam Pernyataan Macron



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Ucapan tersebut menunjukkan pikiran Macron kerdil dan dapat membahayakan upaya membangun dunia yang harmonis.

Prancis sebagai negara sekuler seharusnya menghormati kebebasan beragama. Tidak pantas Islamophobia dilancarkan pemimpin negeri itu

Pernyataan Presiden Prancis bisa mengganggu kedamaian dunia karena mencerminkan ekspresi kebebasan yang tidak bertanggung jawab

Sudah sepatutnya umat Islam di seluruh dunia marah dan mengecam sikap permusuhan yang ditunjukkan secara eksplisit oleh Macron

Kebebasan berekspresi tidak memberikan izin kepada siapa pun untuk melukai perasaan orang lain

Penghinaan Agama/tokoh Agama jelas bukan jenis kebebasan berbicara/ber-ekspresi, melainkan pelanggaran HAM

**SUKAMTA**

**MARDANI**  
ALI SERA

**JAZULI**  
JUWAINI

**BUKHORI**  
YUSUF

**TORIQ**  
HIDAYAT

**HIDAYAT**  
NUR WAHID



# PKS Faction Sent an Official Protest to The President of France

“The PKS faction strongly denounce the French President’s comments that encourages blasphemy against Prophet Mohammad. Therefore, we have sent a formal letter to denounce his controversial remarks

## Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

The Chairman of PKS Faction in the Indonesia’s House of Legislative

The Chairman of PKS Faction in the Indonesia’s House of Legislative condemned the statement made by the French President, Emmanuel Macron, following his support of a blasphemous caricature of the Prophet Mohammad. As a follow up, the PKS faction has also sent a formal letter protesting the President through the French embassy in Jakarta. In addition, the PKS faction also backed the Indonesian Foreign Ministry’s recent move to summon the French ambassador conveying the criticism against the French President’s statement.

“The PKS faction strongly denounce the French

President’s comments that encourages blasphemy against Prophet Mohammad. Therefore, we have sent a formal letter to denounce his controversial remarks,” said Jazuli.

Jazuli Juwaini, who is also the deputy chairman of the International Islamic Forum of Parliamentarians, mentioned that there is a growing rift between the French and the Moslem world, while many of them called for a boycott of French products. He also appreciates the Indonesian Foreign Ministry’s step to call the French ambassador.

“The French President’s remarks could disturb the world’s peace at large, since it

reflected an act of irresponsibility and ignorance. Peace could only be preserved where there is a mutual respect and understanding of every belief, instead of blasphemy and profanity to the Prophet,” stated Jazuli.

As a big country, France should be a role model to create a world peace, based on the respect and tolerance to every religion.

\*\*\*

As reported before, French President Emmanuel Macron made a controversial remarks about Islamist extremism, and triggering a global protest, mainly in Moslem countries. By supporting a controversial cartoon of Prophet Mohammad, Macron is accused of blasphemy. A number of countries has voiced their concerns, while other calls for boycotts of French goods in the Middle Eastern countries, including Kuwait, Qatar and Turkey.



# Fraksi PKS DPR Kirim Surat Resmi Protes ke Presiden Perancis

Fraksi PKS mengecam keras pernyataan Presiden Perancis yang jelas menghina Islam karena mendukung penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad.

Untuk itu, Fraksi PKS mengirim surat resmi protes kepada Presiden Perancis atas sikap dan pernyataan kontroversialnya tersebut

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (29/10) — Ketua Fraksi PKS mengecam pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang mendukung penerbitan kartun penghinaan kepada Nabi Muhammad.

Untuk itu, Fraksi PKS mengirim surat resmi protes kepada Presiden Perancis lewat Duta Besarinya di Jakarta.

Selain itu, Fraksi PKS mendukung sikap tegas Kemenlu yang telah memanggil Duta Besar Perancis untuk Indonesia guna menyampaikan kecaman atas pernyataan Presidennya.

"Fraksi PKS mengecam keras pernyataan Presiden

Perancis yang jelas menghina Islam karena mendukung penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad. Untuk itu, Fraksi PKS mengirim surat resmi protes kepada Presiden Perancis atas sikap dan pernyataan kontroversialnya tersebut," ungkap Jazuli.

Jazuli Juwaini yang juga merupakan Wakil Presiden Forum Parlemen Muslim Dunia menegaskan respon luas khususnya dari negara-negara muslim yang juga mengecam Perancis bahkan menyerukan boikot produk-produk Perancis.

Sikap tegas Kemenlu RI yang memanggil Dubes Perancis untuk menyampaikan sikap dan kecaman sudah tepat dan kita dukung penuh sebagai bagian dari negara yang cinta kedamaian dunia.

"Pernyataan Presiden Perancis bisa mengganggu kedamaian dunia karena mencerminkan ekspresi kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Perdamaian dunia tidak bebas diraih jika orang bebas menghina, mengolok-olok keyakinan lain, apalagi terhadap figur yang sakral bagi



umat beragama," tegas Jazuli.

Seharusnya sebagai negara besar dengan sejarah panjang, Presiden Perancis bisa menjadi contoh dan teladan bagaimana menghadirkan kedamaian dunia yang berangkat dari sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan setiap umat manusia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait ekstremisme Islam telah menuai reaksi keras

dari berbagai negara, terutama negara Arab dan negara mayoritas Islam.

Macron dianggap telah menghina Islam dan membela penerbitan kartun Nabi Muhammad yang kontroversial.

Sejumlah negara telah menyampaikan kecamannya atas pernyataan Macron tersebut, sementara aksi boikot produk Prancis telah diserukan di beberapa negara termasuk Kuwait, Qatar dan Turki.

# HNW: Lebih Baik Macron Ikuti Peradilan HAM Eropa, Jangan biarkan Penistaan pada Nabi Muhammad SAW

penghinaan Agama/tokoh Agama jelas bukan jenis kebebasan berbicara/berespresi, melainkan pelanggaran HAM, sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan HAM PBB di Jenewa Swiss pada (26/3/2009), dan hal serupa juga diputuskan oleh Pengadilan HAM Eropa

## Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (29/10) — Anggota DPR yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengancam Presiden Perancis Emmanuel Macron yang tetap membiarkan penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW berlangsung di Perancis dan mengutuk segala kekerasan yang timbul sebagai akibatnya.

HNW sapaan akrabnya menilai alasan Presiden Macron bahwa kartun yang menistakan Nabi Muhammad sebagai bentuk kebebasan berpendapat/berespresi tidaklah tepat.

Mestinya dalam hal ini Macron lebih mementingkan kemashlahatan umum dengan mengikuti keputusan Peradilan HAM Eropa, yang pada 25/10/2018 sudah menetapkan bahwa penistaan Agama dan tokoh Agama bukanlah bentuk kebebasan berbicara/berespresi.

"Itu terkait dengan kasus Nyonya E.S. yang dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan di Austria, karena yang bersangkutan berulangkali menista Nabi Muhammad dengan penyebutan pedofilia,"

ungkapnya.

Kasus ini, lanjutnya, kemudian oleh yang bersangkutan dibawa ke Pengadilan HAM Eropa, tetapi permohonannya ditolak oleh Pengadilan HAM Eropa dengan penegasan bahwa penistaan kepada Nabi Muhammad bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi.

"Dalam putusannya, Pengadilan HAM Eropa menyebutkan pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah pedofilia merupakan pernyataan yang telah melampaui batas yang diizinkan dari kebebasan berekspresi," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (28/10).

Selain itu, lanjut HNW, Presiden Macron juga perlu merujuk kepada kasus Soile Lautsi vs peradilan Italia, dimana Nyonya Lautsi keberatan dengan adanya crucifix (patung salib katolik) dipasang di sekolah umum di Italia.

"Permohonan ini pun kemudian ditolak oleh Pengadilan HAM Eropa karena patung salib itu bukan hanya



sebagai simbol agama, tetapi juga warisan budaya barat Italia," urainya.

HNW menuturkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan HAM Eropa dalam kasus-kasus tersebut seharusnya sudah tidak perlu ada lagi perdebatan soal antara hubungan kebebasan berekspresi dan penistaan terhadap agama/ tokoh agama. Dan bahwa menghormati Agama/Tokoh Agama dari masing-masing pihak justru akan jadi koreksi terhadap

radikalisme dan ekstremisme, dan malah akan hadirkan toleransi ditengah masyarakat plural. Dan sebagai negara hukum, mestinya Macron menghormati dan mengambil kebijakan sesuai dengan putusan Pengadilan HAM Eropa. "Apalagi, Pengadilan HAM Eropa ini berada di Kota Strassbourg, salah satu kota di Perancis.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)

# Toriq Dukung Seruan MUI dan Ikadi untuk Boikot Seluruh Produk Perancis

Dengan mendukung dan menjalankan seruan MUI tersebut diharapkan menjadi efek jera bagi Prancis dan bagi negara-negara lain yang terus melakukan pelecehan dan penistaan terhadap Nabi Muhammad

## **KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (30/10) — Seruan boikot produk Perancis sudah disuarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ormas Islam di tanah air, diantaranya Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi).

Seruan ini diharapkan menjadi efek jera bagi Perancis dan Anggota Fraksi Pks Toriq Hidayat mendukung seruan tersebut.

“ Dengan mendukung dan menjalankan seruan MUI tersebut diharapkan menjadi efek jera bagi Prancis dan bagi negara-negara lain yang terus melakukan pelecehan dan penistaan terhadap Nabi

Muhammad,” tegas Toriq.

Politikus PKS ini menegaskan bahwa seruan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas islam tentang pemboikotan produk Prancis, juga untuk menunjukkan kecintaan umat islam terhadap Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

“Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang kartun Nabi Muhammad SAW dapat menyulut permusuhan. Alasan kebebasan berpendapat yang dilontarkan Macron itu tidak bisa diterima,” tegas Toriq.

Menurutnya, jika ada suatu

Islam yang melakukan tindak kekerasan, jangan hanya mereka yang disalahkan. Karena itu merupakan dampak dari pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron sendiri.

“Dalam melihat setiap masalah yang terkait dengan umat Islam, negara-negara barat tidak berlaku adil dan jujur. Karena biasanya mereka hanya melihat apa yang terjadi dan enggan mencari akar penyebab mengapa hal itu terjadi,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan Emmanuel Macron harus mencoba ucapannya dan meminta maaf kepada



umat Islam untuk menghindari semakin besar gerakan perlawanan umat islam.

“Saya yakin jika dia mau meminta maaf atas sikap dan tindakannya tersebut, maka umat Islam pasti akan memaafkannya sehingga api permusuhan yang sudah menyala akan bisa padam secepatnya,” pungkas Toriq.

Karena menurut Dewan Pembina Ikadi Tasikmalaya ini, umat islam adalah umat yang paling toleran, menghargai perbedaan, dan tidak memaksa

orang lain untuk mengikuti keyakinannya.

Akan tetapi jika simbol agamanya diganggu, maka umat islam akan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan.

Oleh sebab itu senada dengan Ikadi, PKS juga akan mendesak pemerintah Indonesia agar mengambil sikap tegas dan langkah diplomatik konkrit, bahkan kalau perlu memulangkan Duta Besar Prancis

## Terkait Sikap Presiden Macron

# Fahmy Alaydroes: Kebebasan yang Kebablasan!

Kebebasan itu harusnya memberdayakan dan menumbuhkan peradaban, sebagaimana demi kecamaran nilai kebebasan (franke), adalah kebebasan dari segala dunia perbudakan. Kebebasan yang menjadi tekad Marianne (simbol Republik Prancis), figur kebebasan sejak zaman revolusi

**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed**

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (30/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes menyinggung kecamaran nilai kebebasan yang ditujukan kepada Presiden Perancis Emanuel Macron, akibat ulahnya menghina Nabi Muhammad dan umat Islam.

Menurut Fahmy, meski Perancis menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan sekularisme. Penerapan nilai-nilai tersebut sangat bergantung siapa Presidennya. Kali ini, imbuhnya, sang

Presiden (Macron) melindungi kebebasan berekspresi tabloid Charlie Hebdo ketika mereka membuat kartun-kartun baginda Nabi Muhammad SAW, yang sangat terlarang dalam ajaran Agama Islam.

"Itu sudah masuk dalam tindakan menghina dan menabrak ajaran Islam. Tentu saja, umat Islam di seluruh dunia akan marah," tegas Fahmy.

Fahmy menambahkan, Presiden Macron mesti mengerti dan memahami

bahwa membuat kartun baginda Nabi SAW itu berarti dengan sengaja dan provokatif menyerang dan menghina kehormatan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai dan dijunjung tinggi keahluannya oleh setiap muslim.

"Bahkan, setiap muslim akan siap mempertaruhkan nyawa dan jiwa mereka untuk menjadi benteng pembelanya", tandasnya.

Seharusnya, kata Fahmy, Presiden Perancis bersikap cerdas dan rasional. Bagaimana mungkin melindungi kebebasan berekspresi yang merugikan orang lain, apalagi menghina nabi dan Agama yang sangat mulia.

"Taruhan adalah tindakan pembelaan yang tak kan dapat dicegah..! Alih-alih mau memadamkan aksi teror dan radikalisme, justru malah jadi memicu dan memacu tumbuh subur nya aksi dan tindakan tersebut," ungkap Fahmy.

"Inilah potret sikap pemimpin yang tidak mengerti hakikat kebebasan, yang kemudian menimbulkan kegaduhan dan tindakan-tindakan yang jauh dari perdamaian," imbuhnya.

Sikap provokatif, kata Fahmy, seringkali muncul dari pemimpin yang bersifat rasialis atau menyimpan dendam dan kebencian terhadap suatu kelompok tertentu. "Kebebasan itu harusnya memberdayakan dan menumbuhkan peradaban, sebagaimana akar dari nilai



kebebasan (franke), adalah kebebasan dari segala dunia perbudakan. Kebebasan yang menjadi tekad Marianne (simbol Republik Prancis), figur kebebasan sejak zaman revolusi," terangnya Anggota Komisi X DPR RI ini.

Anggota DPR asal Dapil Jawa Barat ini melanjutkan, Kebebasan yang menjadikan manusia semakin leluasa untuk mengembangkan potensi-potensi kebaikannya, kemandiriannya, dan lepas dari segala cengkraman paksaan, jajahan ataupun kebodohan. Itulah hakikat kebebasan. Bukan kebebasan untuk menyerang, menghina atau menabrak nilai-nilai pihak lain yang melahirkan kebencian, kekerasan dan kerusakan.

Dalam hal penerapan

kebebasan, lanjutnya, mesti menghormati dan menghargai pagar pihak lain. Pasal 29 Deklarasi HAM PBB disebutkan bahwa: Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](https://fraksi.pks.id)



# BKSAP Desak Pemerintah untuk Kecam Sikap Presiden Perancis Emanuel Macron

“Saya mendesak Kemenlu segera memanggil Dubes Prancis dan menyampaikan keberatan atas pernyataan Presiden Marcon. Sekaligus memperkenalkan Islam yang damai di Indonesia

## **Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (26/10) — Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera kecam pernyataan rasis Presiden Prancis Emmanuel Jean-Michel Frederic Macron mengenai Islam dan Umat Muslim.

Hal itu, menurut Mardani, sebagai bentuk islamophobia dan merusak keharmonisan kerukunan umat beragama di dunia.

“Indonesia menolak pernyataan Islam di hubungan dengan separatisme dan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Saya mendesak Kemenlu RI untuk mengancam Presiden Marcon melalui pernyataannya yang berbau rasis,” kata Mardani, Senin (26/10).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus memperkenalkan Islam yang damai.

“Kita bisa mengambil peran menjadi ligatur memperbaiki Islam yang damai, sehingga harmoni menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ujar Mardani.

Sebelumnya, Presiden Prancis pernah menyebut Islam merupakan sumber segala aksi terorisme yang ada di dunia ini. Macron juga mengatakan peristiwa pemencegahan tersebut sebagai penyerangan terorisme Islam.

“Persatuan dan ketegasan adalah jawaban atas aksi kejam terorisme Islam,” tutur Macron kala itu.

Reaksi negatif terhadap Marcon juga setelah pembunuhan seorang guru Prancis yang mempertunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas.

Ia berkata, “Samuel Paty

dibunuh karena para Islamis menginginkan masa depan kami, tapi Prancis tidak akan menyerahkan kartun kami,” ujarnya.

Mardani menyesalkan pernyataan Pemimpin negara Prancis itu. Anggota Komisi II itu menganggap, ujaran tersebut menyebarkan benih kebencian terhadap minoritas muslim disana.

“Prancis sebagai negara yang sekuler seharusnya menghormati kebebasan beragama. Tidak pantas Islamophobia dilancarkan pemimpin negeri itu. penggambaran Nabi Muhammad ini sangat mengganggu umat Islam,” katanya.

Anggota DPR asal pemilihan Jakarta Timur itu berharap Kemenlu segera memanggil Duta besar Prancis di Indonesia untuk minta klarifikasi dan menyampaikan keberatan atas pernyataan rasis Presiden Marcon terhadap minoritas Islam.

“Saya mendesak Kemenlu segera memanggil Dubes Prancis dan menyampaikan keberatan atas pernyataan Presiden Marcon. Sekaligus memperkenalkan Islam yang damai di Indonesia,” pungkasnya.



# Sambangi Kedubes, PKS Desak Macron Tinjau Kembali Pernyataannya

Kami menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia yang kami hormati oleh seluruh umat di dunia. Penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW sama artinya menghina umat Islam dan itu akan menimbulkan kemarahan

## H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (30/10) — Anggota Komisi I Fraksi PKS DPR RI Sukamta mewakili Presiden PKS Ahmad Syaikhun menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron di kantor Kedubes Prancis di Jakarta, Jumat (30/10/2020).

Sukamta berharap Presiden Prancis itu bisa meninjau kembali kebijakan dan ucapannya terkait penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebab menurut dia kebebasan berekspresi itu ada batasnya.

Hal tersebut dikatakan Sukamta saat mengunjungi Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, Jumat (30/10/2020).

"Kami menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia yang kami hormati oleh seluruh umat di dunia. Penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW sama artinya menghina umat Islam dan itu akan menimbulkan kemarahan," kata dia.

Kalau dibiarkan, kata dia, akan melanggar kebebasan berekspresi karena itu sifatnya penghinaan dan itu akan

memprovokasi orang-orang Islam yang moderat, orang Islam yang tidak radikal, orang Islam yang tidak mau kekerasan tapi merasa tersakiti oleh ejekan kartun itu.

"Kami berharap Presiden Prancis itu bisa meninjau kembali kebijakan dan ucapannya karena kebebasan berekspresi itu ada batasnya.

Di Eropa di Prancis juga ada tabunya. Mereka kalau udah anti-semit itu tidak berani. Dilarang keras, haram hukumnya," ujar dia.

"Nah, kedudukan penghi-



naan terhadap Nabi Muhammad bagi umat Islam mungkin lebih sensitif terhadap penghinaan anti-semit. Maka kami menyampaikan sikap kami untuk disampaikan kepada Presiden Macron," kata dia menambahkan.

Ia menjelaskan PKS tetap menjalin hubungan baik antara

bangsa Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera dengan masyarakat Prancis dan Pemerintah Prancis secara umum.

"Mudah-mudahan urusan itu segera bisa diselesaikan sampai Presiden Macron menarik ucapannya yang menghina umat Islam itu," tegas Anggota Komisi I DPR RI itu.

# Aleg PKS Kecam Presiden Perancis yang Jelas Menghina Islam dan Nabi Muhammad

Pernyataan Macron yang tidak akan melarang penerbitan kartun Nabi Muhammad dan mengatakan Islam agama yang sedang krisis merupakan bagian dari hinaan

**Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (30/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly mengencam pernyataan Presiden Perancis yang jelas-jelas menghina Islam.

Menurutnya, kita tidak memaksa pemeluk agama lain untuk mempercayai bahwa nabi muhammad itu wajib kita (umat islam) muliakan, karenanya memercayainya termasuk rukun iman, dan memuliakannya bagian wajib dari rukun islam.

Makanya, imbuh Junaidi, nama Nabi itu dimasukkan ke dalam syahadat dan shalat. Tapi, kita juga tidak mungkin

membiarkan orang lain melecehkan, menistakan, menghinakannya secara sembarangan.

"Pernyataan Macron yang tidak akan melarang penerbitan kartun Nabi Muhammad dan mengatakan Islam agama yang sedang krisis merupakan bagian dari hinaan," ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Jum'at, (30/10)

Junaidi menambahkan, bahwa pernyataan yang tidak berdasar tentang Islam sebaiknya tidak dilakukan dan tidak diulang.

Selain itu, Aleg PKS asal Lampung ini menegaskan bahwa agama Islam adalah agama pembawa perdamaian dan penuh kasih sayang, bahkan di negara kita hari kelahiran Nabi Muhammad dijadikan sebagai hari libur nasional yang bisa dirasakan oleh semua masyarakat.

"Ini artinya penghinaan kepada Nabi jangan dipandang hanya persoalan personal belaka, tapi ini sudah menyangkut marwah agama, umat Islam, dan negara," tegas Junaidi.



## Polemik Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron

# Bukhori: Sudah Sepatutnya Dikecam!

“Saya khawatir sikap permusuhan oleh Macron ini akan memicu bahaya di kemudian hari jika tidak diantisipasi. Artinya, sangat potensial isu ini menjadi tanggung-an oleh segelintir kelompok radikal untuk menciptakan kekacauan di tengah masyarakat sehingga bisa berakibat pada timbulnya lebih banyak korban.

### **KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (27/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf angkat bicara terkait tindakan permusuhan yang dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap muslim pasca insiden terbunuhnya seorang guru Perancis yang mempertunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir Presiden termuda Prancis tersebut telah bersikap agresif terhadap Islam melalui tuduhan muslim separatismenya dan menggambar Islam sebagai agama yang mengalami krisis di seluruh dunia.

Komentarnya tersebut

tidak lepas dari wujud dukungan Macron terhadap penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh majalah Charlie Hebdo atas klaim kebebasan berekspresi.

“Bukan kali ini saja Perancis melakukan tindakan agresif terhadap Islam maupun komunitas muslim, baik dalam skala perorangan maupun Negara. Maka sudah sepatutnya umat Islam di seluruh dunia marah dan mengecam sikap permusuhan yang ditunjukkan secara eksplisit oleh Macron,” tegas Bukhori di Jakarta, Senin (26/10/2020)

Politisi PKS ini menambahkan, pihaknya sangat mendukung tindakan warganet,

masyarakat Arab yang melakukan boikot, maupun segenap muslim di seluruh dunia yang merasa terusik sehingga memutuskan berdiri untuk membela kemuliaan Nabi Muhammad.

“Ilustrasi Nabi Muhammad melalui gambar sangat mengusik rasa keagamaan umat Islam mengingat dalam tradisi Islam hal tersebut secara jelas dilarang. Karena itu, jika ia (red, Macron) memang berkomitmen untuk menghormati segala perbedaan dalam semangat perdamaian, semestinya ia juga mampu menghormati prinsip kebebasan berkeyakinan sebagai sebuah nilai universal” ujarnya.

Lebih lanjut, alumni Universitas Islam Madinah Arab Saudi ini mengingatkan agar Presiden Perancis tersebut segera meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya proses radikalisasi terselubung dan meruncingnya polarisasi di tengah masyarakat Perancis dan global.

“Saya khawatir sikap permusuhan oleh Macron ini akan memicu bahaya di kemudian hari jika tidak diantisipasi. Artinya, sangat



potensial isu ini menjadi tanggungan oleh segelintir kelompok radikal untuk menciptakan kekacauan di tengah masyarakat sehingga bisa berakibat pada timbulnya lebih banyak korban. Sebelum segalanya menjadi lebih buruk, la harus meminta maaf dan memastikan keinginan ini tidak terlung di waktu mendatang,” tegasnya

Di sisi lain, Bukhori juga menyoroti fenomena Prancis sebagai negara di Eropa yang menyumbang persentase tertinggi angka kelahiran bayi di luar pernikahan berdasarkan

temuan Eurostat pada 2018. Ia menilai sistem sekularisme Perancis yang menyudutkan peran agama dalam kehidupan masyarakat telah memberikan efek buruk bagi wacana pembentukan institusi keluarga yang utuh.

“Nyatanya dibalik slogan kebebasan yang gigit mereka dukungan, terdapat banyak bayi yang lahir dari buah perkawinan yang tidak sah. Alhasil, kebebasan anak untuk berhak memiliki orang tua yang utuh dan bertanggung jawab terkorbakan,” pungkasnya.

# Habib Aboe: Presiden Jokowi Harus Tekan Macron Untuk Minta Maaf!

Presiden Jokowi harus menekan Presiden Macron agar meminta maaf dan mencabut ucapannya. Hal itu perlu dilakukan, karena amanah konstitusi kita menyampaikan bahwa salah satu tujuan kita bernegara adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang juga didasarkan perdamaian abadi

## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (01/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang juga merupakan Sekjen PKS, Aboe bakar Al-Habsy, mengemukakan tindakan Presiden Perancis Emanuel Macron yang menghina Nabi Muhammad dan umat Islam.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, tindakan Macron sangat menyayat hati umat Islam di Indonesia dan dunia.

Apalagi, lanjut Anggota Komisi III ini, dukungan Macron

atas penistaan Nabi Muhammad SAW dilakukan saat umat Islam sedang merayakan maulid Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

"Harus dipahami saat bulan maulid ini, umat Islam banyak menjalankan kegiatan untuk mengingat dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, sehingga penistaan tersebut dan tindakan Macron tentu terasa sangat menyakitkan umat Islam," tegas Habib Aboe.

Dalam konteks politik global, lanjutnya, tindakan Macron juga sangat membahayakan ketertiban dunia, karena telah menyinggung sekitar 25% populasi dunia, yakni lebih dari 1,9 miliar warga dunia yang beragama Islam tersakiti hatinya atas indakan ini.

"Tentunya ini tidak baik untuk ketertiban dan perdamaian dunia, karena dikhawatirkan akan mengancam adanya konflik sosial," ungkap Habib Aboe.

Oleh karena itu, imbuhnya, Presiden Jokowi harus menekan Presiden Macron agar meminta maaf dan mencabut ucapannya.

"Hal itu perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi, karena amanah konstitusi kita menyampaikan bahwa salah satu tujuan kita bernegara adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang juga didasarkan perdamaian abadi," papar Habib Aboe.

Atas dasar itu, katanya, maka Indonesia harus berperan



aktif untuk menyikapi persoalan ini, dengan tetap menjaga prinsip dasar politik luar negeri kita yang menganut politik bebas aktif.

"Sikap tegas Presiden Jokowi juga sangat penting untuk mewakili ratusan juta umat Islam di Indonesia. Presiden harus memahami suara hati masyarakat muslim Indonesia," terangnya.

Sudah begitu banyak aspirasi dari MUI serta berbagai

Ormas lainnya, imbuh Aboe, bahkan tidak sedikit di antara masyarakat kita yang menyerukan dan melakukan langkah pemboikotan terhadap produk Perancis.

"Tentunya refleksi atas sikap berbagai lembaga dan masyarakat ini harus didengar dan diwakili oleh Presiden Jokowi dalam sikap tegasnya di kancah internasional," tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini.

# MACRON HARUS MINTA MAAF

Indonesia harus berperan aktif menyikapi persoalan ini, dengan tetap menjaga prinsip dasar politik luar negeri kita yang menganut politik bebas aktif.

Oleh karena itu, Indonesia melalui Presiden Jokowi harus menekan Presiden Macron agar meminta maaf dan mencabut ucapannya yang melecehkan umat Islam dan nabinya.

Amanah konstitusi kita menyebutkan bahwa salah satu tujuan kita bernegara adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang juga didasarkan perdamaian abadi

PKS sampaikan surat protes ke kedubes Prancis



## **SALIM SEGAF ALJUFRI**

Seorang pemimpin seharusnya membuat situasi kondusif. Tapi apa yang dilakukan Macron justru membuat dunia bergejolak.

## **AHMAD SYAIKHU**

Saat kita mencintai seseorang maka tak akan pernah rela jika ada seseorang yang kita cintai dihina dan dinistakan

## **JAZULI JUWAINI**

Bersikaplah gentlement Presiden Macron dengan meminta maaf kepada umat Islam dunia. Selanjutnya, mari promosikan ketertiban dan perdamaian dunia dengan mendukung kebebasan yang bertanggung jawab

## **ABOEBAKAR ALHABSY**

Presiden Jokowi harus menekan Presiden Macron agar meminta maaf dan mencabut ucapannya.

## **FAHMY ALAYDROES**

Bagaimana mungkin melindungi kebebasan berekspresi yang merugikan orang lain, apalagi menghina nabi dan Agama yang sangat mulia.

## **JUNAIDI AULY**

Penghinaan kepada Nabi sudah menyangkut marwah agama, ummat Islam, dan negara





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



## TEROPONG DEMOCRACY AWARD 2020

TEROPONG  SENAYAN.com

# *Terima Kasih*

Terima Kasih atas dukungan sahabat Fraksi PKS

- **Fraksi PKS DPR RI** Kategori Voices Of Democracy
- **Dr. H. Jazuli Juwaini, MA** Kategori Hope of Democracy
- **Dr. H. Mardani, M.Eng.** Kategori Best Freedom of Speech
- **H. Ahmad Syaikhu** Kategori Rising Star of Democracy

## Teropong Democracy Award

# Presiden PKS Raih Penghargaan Rising Star of Democracy

Demokrasi itu meniscayakan adanya perbedaan. Kita harus menghargai dan komitmen terhadap itu. Karenanya PKS berjuang keras melakukannya, bukan sekadar slogan

### H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS

Jakarta (28/10) — Presiden PKS Ahmad Syaikhul meraih penghargaan Rising Star of Democracy 2020 di ajang Teropong Democracy Award (TDA), Rabu (28/10/2020) secara virtual, di Jakarta.

Syaikhul dianggap memenuhi kriteria sebagai tokoh baru yang memperjuangkan demokrasi di panggung politik nasional.

Menurut Penyelenggara, kriteria dimaksud antara lain: a) membawa inspirasi perubahan untuk masa depan; b) mendorong budaya demokrasi yang sehat; dan c) memiliki

program atau terobosan guna mewujudkan perubahan nyata bagi demokrasi Indonesia.

"Alhamdulillah. Saya tentu saja bersyukur atas penghargaan ini. Sejatinnya, penghargaan ini juga untuk seluruh Keluarga Besar PKS," kata Syaikhul.

Menurut Anggota DPR RI itu, selama ini, PKS terus berupaya strengthen dan menjaga kepastian demokrasi Indonesia dengan sikap yang konsisten berada di luar pemerintahan, memastikan fungsi check and balances tetap berjalan dan terus

berupaya menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. PKS ingin menjaga demokrasi sesuai fitrahnya.

"Sejak awal PKS menegaskan sikapnya sebagai oposisi. Karena oposisi merupakan fitrah demokrasi," ungkap Syaikhul.

Pasca Pilpres 2019, lanjut Syaikhul, PKS berkomitmen menyatukan kembali elemen bangsa yang sempat terbelah.

PKS sangat menghargai keberagaman dan perbedaan sikap politik yang diambil setiap pihak, karena menghargai keberagaman bagian dari nilai demokrasi itu sendiri yang harus senantiasa dijunjung.

"Demokrasi itu meniscayakan adanya perbedaan. Kita harus menghargai dan komitmen terhadap itu. Karenanya PKS berjuang keras melakukannya, bukan sekadar slogan," tegas Syaikhul.

Langkah menjaga keberagaman demokrasi itu bisa dilihat dengan Silaturahmi



Kebangsaan yang telah PKS lakukan ke lintas partai politik, ormas keagamaan, dan elemen masyarakat sipil lainnya.

"PKS berharap ke depan kita semua dapat terus berkontribusi menjaga persatuan Indonesia, serta membangun demokrasi kita lebih baik lagi, menuju demokrasi yang substansial," ujar Syaikhul.

Penghargaan ini, tambah Syaikhul, bukan karena kerja-kerja individu, melainkan gerak bersama sebagai sebuah institusi yang bernama PKS.

"Ini bukan karena kerja

individu atau pribadi, tapi kebersamaan sebagai sebuah partai politik (PKS)," kata Syaikhul.

Tak lupa, mantan Wakil Walikota Bekasi itu mengucapkan terimakasih kepada Media Teropong Senayan atas penghargaan Rising Star of Democracy yang telah diberikan.

"Atas nama Keluarga besar PKS, saya mengucapkan terimakasih dan ke depan, akan semakin bersemangat untuk terus berperan aktif memajukan demokrasi di Indonesia," pungkas Syaikhul.





MEMPERINGATI MAULID NABI  
**MUHAMMAD**  
12 RABIUL AWWAL 1441 H

وَاللَّهُ سَلَّمَ  
صَلَّى عَلَيْهِ



Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. H. Jazuli Juwaini, MA bersama  
Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Aljufri, MA dan  
Habib Aboe Bakar Alhabsy dan beberapa tokoh  
dalam sebuah acara.

## Momentum Sumpah Pemuda

# Rafli Ajak Pemuda Berwirausaha

Masa depan Bangsa ditentukan oleh pemuda yang berkarakter, berintegritas dan berakhlak. Hari ini, hendaknya selain memberi teori ataupun materi bagaimana menjadi pemuda yang mampu membangun bangsa yang besar, Generasi muda sangat perlu di beri motivasi serta dukungan guna mendorong minat mereka untuk berwirausaha

### RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (28/10) — Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-92 yang jatuh pada Rabu 28 Oktober 2020, Anggota DPR RI Rafli, mengajak pemuda di Aceh sinergi dan jeli melihat peluang wirausaha yang tersedia.

Menurutnya, Peran generasi muda dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sangat penting di era digital saat ini.

"Mendorong minat generasi muda untuk berwirausaha menjadi hal yang harus dilakukan" Ujarnya

"Masa Depan Bangsa ditentukan oleh pemuda yang berkarakter, berintegritas dan

berakhlak. Hari ini, hendaknya selain memberi teori ataupun materi bagaimana menjadi pemuda yang mampu membangun bangsa yang besar, Generasi muda sangat perlu di beri motivasi serta dukungan guna mendorong minat mereka untuk berwirausaha" Ucap Rafli Rabu (28/10).

Revitalisasi pemuda di Aceh khususnya, dirasa perlu untuk meningkatkan daya saing global.

Di dalam pasal 26 Qanun nomor 4 tahun 2018 telah dijelaskan bahwa Pemerintah Aceh memfasilitasi pelaksanaan pengembangan

kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf (g) yang diwujudkan dengan cara memfasilitasi pembentukan LPKP di Aceh.

Ini akan menjadi ruang bagi pemerintah Aceh untuk melibatkan pemuda untuk ikut membangun perekonomian Aceh dengan menumbuhkembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda. Kehadiran Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Aceh (LPKPA) penting dalam menciptakan kader-kader enterpreuner muda baru



di Aceh.

Pembentukan LPKP di Aceh juga sejalan PP Nomor 60 Tahun 2013 tentang lembaga permodalan kewirausahaan pemuda pasal 3, yang menyebutkan bahwa LPKP berfungsi memfasilitasi akses

permodalan bagi wirausaha muda pemula untuk memulai menjalankan usaha.

"Momentum sumpah Pemuda, merupakan kesempatan merenungi dan mengambil nilai dari peristiwa tersebut," tutup Rafli.

Peringati Sumpah Pemuda

# Habib Aboe Ajak Elemen Bangsa Bersatu Jaga NKRI

Peringatan Sumpah Pemuda mengingatkan arti penting persatuan. Bahwa dengan persatuan, kita dapat merebut kemerdekaan. Tentunya saat ini dengan persatuan pula kita akan bisa mempertahankan kemerdekaan

## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (28/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsy mengingatkan arti penting persatuan dan kesatuan di Hari Sumpah Pemuda, Rabu, (28/10).

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini Sumpah Pemuda memiliki makna yang sangat penting untuk semua bangsa Indonesia.

"Peringatan Sumpah Pemuda mengingatkan arti penting persatuan. Bahwa dengan persatuan, kita dapat merebut kemerdekaan. Tentunya saat ini dengan persatuan pula kita akan bisa mempertahankan kemerdekaan," ungkap Anggota Komisi III DPR RI ini.

Habib Aboe menambahkan Sumpah Pemuda mengingatkan

kita agar tidak mudah diadu domba antar sesama anak bangsa.

"Supaya kita tidak mudah dibenturkan antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kesadaran ini sangat penting di era global yang didominasi dengan perang asimetris yang menggunakan pendekatan proxy war," tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS ini.

Tidak kalah pentingnya, kata Habib Aboe, Sumpah Pemuda memberikan nilai nasionalisme yang kuat, yaitu masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, disatukan menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia dan satu tanah air yaitu tanah air

Indonesia.

"Ini mengandung makna agar kita selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan kelompok," ujarnya.

Selain itu, imbuhnya, semangat nasionalisme ini juga mengingatkan kita agar tidak menjadi bagian pihak yang memuluskan kepentingan asing di bumi pertiwi.

"Sumpah pemuda adalah deklarasi kesatuan tanah air yang harus dijaga dan dilindungi. Karenanya, setiap anak bangsa harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pihak asing," tandas Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini.



# Ketua Fraksi PKS DPR RI Raih Teropong Democracy Award 2020

Penghargaan ini untuk seluruh anggota Fraksi PKS di seluruh Indonesia dari pusat hingga daerah agar semakin kokoh dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan umat, dan mengokohkan nasionalisme Indonesia,"

## Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

28 Oktober 2020 menjadi berkah tersendiri bagi Fraksi PKS DPR RI karena pada momen Hari Sumpah Pemuda ini Fraksi PKS DPR RI diganjar penghargaan dari Media Nasional Teropong Senayan dalam 2 Kategori bergengsi yaitu (1) Kategori Voice of Democracy untuk Fraksi PKS DPR RI dan (2) Kategori Hope of Democracy untuk Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Dalam acara penganugerahan secara online dan dibuka oleh Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin ini, Fraksi PKS DPR RI dipilih sebagai penerima Voice of Democracy karena dinilai aktif menyuarakan aspirasi rakyat di

Parlemen, memiliki kedekatan dengan media, terbuka atas informasi, dan tanggap atas isu-isu aktual nasional dan daerah.

Sementara Jazuli Juwaini terpilih memperoleh penghargaan Hope of Democracy karena dinilai menjadi figur tokoh politik yang bisa menjadi harapan masyarakat di lembaga legislatif, memperjuangkan kepentingan rakyat untuk kesejahteraan umum, serta aspiratif dan komunikatif kepada masyarakat luas.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih karena Fraksi PKS mendapatkan penghargaan dalam dua nominasi sekaligus.

la berharap penghargaan ini bisa meningkatkan kinerja Fraksi PKS dalam memperkuat demokrasi di Indonesia yang berdampak langsung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

"Penghargaan ini untuk seluruh anggota Fraksi PKS di seluruh Indonesia dari pusat hingga daerah agar semakin kokoh dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan umat, dan mengokohkan nasionalisme Indonesia," tandas Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas dan bermakna dengan memerankan peran kontrol dan penyeimbang (checks and balances) yang kritis dan konstruktif kepada Pemerintah di Parlemen.

Jazuli Juwaini juga menyerukan kepada semua pihak untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi di Republik ini, diantaranya dengan menghormati dan menghargai perbedaan pendapat diantara sesama anak bangsa.



#PRAYFOR  
TURKEY



اللهم اجزمهم في مصيبتهم واخلفهم فيها منها

Turut Berduka Atas Musibah  
Gempa Bumi yang melanda Turki  
pada Jum'at 30 Oktober 2020

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

# Legislator PKS Berbela Sungkawa atas Gempa yang Terjadi di Turki

“Saya berharap Kemenlu segera membuat saluran emergency dan komunikasi darurat di Turki dan Yunani untuk memantau WNI kita yang ada di kedua negara sehingga lewat satu pintu kita semua bisa memantau setiap perkembangan dan penangganya

## Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Jakarta (30/10) — Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almsyahari mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 SR yang melanda lepas pantai Turki barat pada Jumat (30/10/2020), menurut Survei Geologi AS.

“Kami sangat berduka dan turut berbelasungkawa atas musibah gempa dan tsunami yang menimpa Rakyat Turki. Kami ingat betul bagaimana Turki banyak membantu kita saat musibah gempa dan tsunami di Aceh, semoga Allah SWT memberikan kesabaran

dan kekuatan untuk semua Korban dan Semua Rakyat Turki” ujar Kharis dalam keterangan tertulis kepada Media, Jum’at (30/10).

Anggota DPR RI asal Fraksi PKS ini meminta agar pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sebagai Mitra Komisi 1 DPR RI segera melakukan pengecekan terhadap WNI yang ada di Turki serta segera berkomunikasi dengan Pemerintah Turki terkait bantuan apa yang bisa Indonesia berikan.

“Tentu tidak mudah mencari informasi siapa saja korban asal Indonesia yang kena musibah ini, namun saya

berdoa semoga tidak ada WNI yang menjadi korban dalam musibah ini,” harap Kharis.

Dikabarkan sejumlah media gempa juga terasa di Yunani termasuk ibukota Athena.

“Saya berharap Kemenlu segera membuat saluran emergency dan komunikasi darurat di Turki dan Yunani untuk memantau WNI kita yang ada di kedua negara sehingga lewat satu pintu kita semua bisa memantau setiap perkembangan dan penangganya. Semoga kita juga bisa membantu negara sahabat kita ini mengingat besar dan luasnya dampak dari musibah,” tutup Kharis politisi asal Solo ini.



**#PRAY  
FOR  
TURKEY**



”

*Kami sangat berduka dan turut berbelasungkawa atas musibah gempa dan tsunami yang menimpa Rakyat Turki. Kami ingat betul bagaimana Turki banyak membantu kita saat musibah gempa dan tsunami di Aceh, semoga Allah SWT memberikan kesabaran dan kekuatan untuk semua Korban dan Semua Rakyat Turki.*

***Dr. Abdul Kharis A, SE. M.Si.Akt***

*Wakil Ketua Komisi I DPR RI*

# Aleg PKS Akan Pastikan Keberangkatan Menhan RI Ke AS Tak Terkait Normalisasi Hubungan Israel

“PKS akan terus mengawal Komitmen Bangsa Indonesia atas Kemerdekaan Palestina. Dan akan memastikan kedatangan Menhan RI Ke Amerika Serikat tidak terkait tawaran normalisasi hubungan dengan Israel dengan iming-iming ditukar dengan penjualan persenjataan canggih mereka”

## **KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (28/10) — Direktur badan intelijen Mossad, Yossi Cohen, dalam siaran televisi Israel N12 pada Ahad pagi mengatakan normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel akan diumumkan setelah pemilu AS berakhir.

Menanggapi hal tersebut Toriq Hidayat mengungkapkan bahwa Hubungan rahasia antara Israel dan Arab Saudi telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.

“Tampak pada pergeseran kebijakan putra mahkota Arab Saudi, yang melihat Israel

sebagai mitra strategis dalam perang melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut,” terang Toriq.

Namun Politisi PKS yang berkantor di senayan ini meyakini bahwa normalisasi Arab Saudi dan Israel adalah sesuatu yang sulit direalisasikan mengingat Arab Saudi dianggap sebagai mercusuar dunia Muslim dan normalisasi dengan Israel akan mendapat perlawanan dari kaum konservatif Arab Saudi.

“Diketahui Arab Saudi pada 2002 menginisiasi

bersama dengan negara-negara arab lainnya menawarkan akan menormalisasi hubungan dengan Israel. Jika negara zionis ini memberikan kemerdekaan pada Rakyat Palestina dan menarik seluruh pasukannya dari wilayah Palestina yang mereka rebut pada 1967”, ujar Toriq.

“Namun Peristiwa Arab Spring Di beberapa negara arab menyebabkan ketidakstabilan politik, konflik saudara, dan intervensi asing. Berbagai peristiwa besar itu mengubah geopolitik di Timur Tengah. Antara lain menguatnya pengaruh Iran yang dianggap sangat berbahaya oleh sejumlah negara Arab. Bahkan dianggap lebih berbahaya dari Israel”, imbuhnya.

Pola pikir negara-negara arab ini kemudian dijadikan momentum oleh sekutu kuat Israel yakni Amerika Serikat untuk menekan negara-negara arab supaya mau menormalisasi hubungan dengan Israel. Dengan iming-iming AS akan menjual



persenjataan canggih mereka.

Beberapa waktu lalu Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menandatangani perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel.

Senada dengan Palestina, Toriq mengatakan perjanjian tersebut sebagai pengkhianatan atas dukungan kemerdekaan Palestina yang dibuat pada tahun 2002 oleh negara-negara Arab itu sendiri.

Oleh karenanya Toriq berharap Pemerintah Indonesia tidak mengekor langkah Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab dan Bahrain yang telah lebih dulu

menormalisasi hubungannya dengan Israel. Karena Amerika Serikat akan terus memastikan langkah-langkah normalisasi akan diikuti oleh negara-negara lainnya.

“PKS akan terus mengawal Komitmen Bangsa Indonesia atas Kemerdekaan Palestina. Dan akan memastikan kedatangan Menhan RI Ke Amerika Serikat tidak terkait tawaran normalisasi hubungan dengan Israel dengan iming-iming ditukar dengan penjualan persenjataan canggih mereka”, tegas anggota Komisi 1 DPR RI ini.



# Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di BUMN Jauh Panggang dari Api

Belum tuntasnya kasus mega skandal Jiwasraya, penyuaipan oleh direksi PT PAL, dan masih banyak lagi kasus korupsi yang terungkap. Yang terbaru misalnya, temuan yang diduga pemberian upeti dari PT Dirgantara Indonesia kepada sejumlah pejabat publik sebesar Rp178 miliar

## **AMIN AK, M.M.**

Anggota Komisi VI DPR RI

Surabaya (31/10) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengingatkan komitmen Menteri BUMN untuk membenahi tata kelola BUMN dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Menurut Amin, GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

"Prinsip-prinsip GCG yang

meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi/Kemandirian dan Kesetaraan sejauh ini masih menjadi 'pelajaran' yang dihafal belum menjadi tata kelola yang dilaksanakan dengan baik," ungkapnya.

Indikator sederhananya, kata Amin, bisa dilihat dari berbagai masalah akut yang terjadi di tubuh BUMN seperti kasus-kasus korupsi, banyaknya BUMN yang rugi, besarnya utang dan kesulitan likuiditas.

"Belum tuntasnya kasus

mega skandal Jiwasraya, penyuaipan oleh direksi PT PAL, dan masih banyak lagi kasus korupsi yang terungkap. Yang terbaru misalnya, temuan yang diduga pemberian upeti dari PT Dirgantara Indonesia kepada sejumlah pejabat publik sebesar Rp178 miliar," terang Amin.

Masyarakat, imbuhnya, juga dikejutkan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di tubuh PT Garuda Indonesia, padahal Juli 2020 lalu maskapai tertua di Indonesia itu menerima suntikan Rp8,5 triliun dana talangan dari APBN lewat mekanisme mandatory convertible bond ( MCB) atau obligasi wajib konversi. "Artinya dana talangan tersebut secara otomatis nantinya akan menjadi tambahan penyertaan modal pemerintah ke PT Garuda Indonesia," tandas Amin.

Amin juga menyoroti banyaknya penunjukan komisaris BUMN yang tidak berbasis kompetensi. Baik yang berasal dari Tim Sukses, reko-



mendasi Partai Politik maupun unsur lainnya. Jumlahnya juga melebihi kebutuhan. Misalnya Komisaris PT PLN (Persero) berjumlah 10 orang.

"Ditambah lagi temuan Ombudsman, paling sedikit ada 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan dan 167 orang yang juga terindikasi hal yang sama duduk di kursi anak usaha. Hal tersebut menjadikan beban BUMN makin berat dan semakin jauh dari harapan untuk bisa mencapai tujuan pendiriannya," papar Amin.

Sesuai dengan UU Perseroan Terbatas (PT), imbuh

Amin, tugas dewan komisaris adalah memastikan bahwa tindakan eksekutif (dewan direksi) sudah sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

"Untuk menjalankan fungsinya dengan efektif, dewan komisaris diberi alat kelengkapan lainnya, seperti komite audit," ujarnya.

Selain UU, lanjut Amin, juga ada Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 yang mengatur perilaku BUMN dengan pedoman tata kelola BUMN.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](https://fraksi.pks.id)

# Anggota Komisi VII FPKS: Pemerintah Harus Tegas Hadapi Freeport

Sedikitnya sudah dua kali PTFI melanggar target waktu yang ditentukan. Modusnya sama, merasa menghadapi banyak kendala yang membuat mereka sulit merealisasikan pembangunan smelter sesuai target. Kemudian minta pemakluman dari Pemerintah

## Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Baleg DPR RI

Jakarta (29/10) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah tegas hadapi PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam hal pembangunan smelter.

Smelter adalah fasilitas pengolahan sisa bahan tambang untuk mengurangi berbagai material yang ada di dalamnya.

"Pembangunan smelter ini diperlukan untuk mendapat nilai tambah dari material sisa tambang yang selama ini diekspor oleh perusahaan tambang," ungkap Mulyanto.

Berdasarkan UU Minerba

yang baru, lanjutnya, PTFI wajib membangun smelter paling lambat tiga tahun sejak UU Minerba itu diberlakukan. UU Minerba yang baru disahkan pada tahun 2020 maka paling lambat pada tahun 2023 PTFI harus sudah selesai membangun smelter. "Tapi hingga kini, progresnya sangat minim, minta mundurkan jadwal," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini pun meminta Pemerintah tidak lagi memberi toleransi kepada PTFI dalam hal

pembangunan smelter sebagai syarat perpanjangan operasional Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Jika hingga tahun 2023 PTFI tidak juga selesai membangun smelter sesuai ketentuan, maka menurut perundangan haram hukumnya ekspor konsentrat oleh PTFI.

"Saya menilai PTFI hanya bikin gaduh dan memaksakan kehendaknya untuk menghindari UU Minerba dan kesepakatan saat diberikan izin usaha penambangan khusus (IUPK). Ini niat yang tidak baik. Karena itu Pemerintah harus tegas menolaknya. Jangan lembek, apalagi mau didikte oleh PTFI," tegas Mulyanto.

Mulyanto minta kali ini Pemerintah jangan mau membuka pintu negosiasi alias tawar-menawar bersekongkol untuk bersama-sama melanggar UU.

Mulyanto menilai PTFI tidak punya itikad baik dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



"Sedikitnya sudah dua kali PTFI melanggar target waktu yang ditentukan. Modusnya sama, merasa menghadapi banyak kendala yang membuat mereka sulit merealisasikan pembangunan smelter sesuai target. Kemudian minta pemakluman dari Pemerintah," terangnya.

"Tahun ini juga begitu. Alasannya terkendala pandemi Covid 19. Bagi saya ini alasan yang dicari-cari untuk dapat menghindari dari kewajiban," lanjut Mulyanto.

Mulyanto minta kali ini

Pemerintah lebih tegas. Pemerintah harus punya keinginan kuat menegakkan UU Minerba. Sekiranya PTFI tidak dapat memenuhi target pembangunan smelter, maka sudah selayaknya Pemerintah melarang ekspor konsentrat tembaga perusahaan asal Amerika tersebut.

"Jangan sampai ada oknum Pemerintah yang main mata dengan perusahaan tambang ini. Saya rasa KPK perlu ambil tindakan," tandas Mulyanto.

## Bulan Kelahiran Nabi Muhammad

# Iskan Ajak Umat Teladani Rasulullah

“Bulan ini bulan yang istimewa maka dari itu, umat harus bisa mengambil momentum mengingat kembali sejarah Nabi, mengingat kembali kehidupan Nabi. Kemudian, kita semua mengambil pelajaran dari situ serta menjadikan peristiwa ini sebagai sarana mempersatukan umat

### H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Medan (31/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mengajak umat untuk mengambil momentum dalam mengingat kembali kisah perjuangan Rasulullah.

Dari kisah-kisah Nabi Muhammad, kata Iskan, setiap orang diharapkan dapat meneladani kepribadian Rasulullah SAW.

“Bulan ini bulan yang istimewa maka dari itu, umat harus bisa mengambil momentum mengingat kembali sejarah Nabi, mengingat kembali kehidupan Nabi. Kemudian, kita semua mengambil pelajaran dari situ

serta menjadikan peristiwa ini sebagai sarana mempersatukan umat,” ujar Iskan.

Menurutnya, bagi umat muslim peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun ini berjalan dengan sedikit berbeda, berbagai bentuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tentunya harus di sesuaikan dengan kondisi pandemi.

“Menyikapi wabah mematikan, seperti pandemi Covid-19 yang sedang melanda di berbagai penjuru dunia saat ini, yang dalam literatur klasik disebut tha’un, Nabi Muhammad SAW mengajarkan

kepada kita semua untuk juga menilainya secara positif,” urainya.

Berkaca pada ajaran Nabi, lanjut Iskan, bahwa dari wabah ini, kita bisa banyak melakukan muhasabah dan refleksi diri. Betapa lemahnya manusia di hadapan Allah, kita juga didorong untuk banyak berubah. Menjadi lebih baik.

“Lebih disiplin pada protokol kesehatan. Lebih menjaga kebersihan, memperkuat imunitas, saling peduli dan membantu. Makin kreatif dan inovatif memecahkan tantangan. Kian adaptif pada kemajuan. Termasuk perkembangan



teknologi digital. Makin diperkuat kemandirian. Dan banyak lagi,” papar Iskan.

“Dari ajaran Nabi, kita yakin wabah Covid-19 ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah agar kekuatan sabar dan keteguhan kita makin kokoh. Umat harus yakin, sebagai cobaan, Covid-19 akan berlalu. Kepada kita diajarkan semuanya, fa inna ma’al usri yusran, inna ma’al usri yusra, bahwa bersama kesulitan akan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan.”

Legislator PKS asal Sibuhun ini juga menyampaikan dan mengajak

umat untuk mendoakan Agar wabah Covid 19 segera berakhir.

“Ketahuilah, Nabi Muhammad SAW adalah teladan perubahan, pesan sabdanya, agar hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok lebih baik dari hari ini. hikmah yang bisa diambil ditengah pandemi ini, kita dipaksa berubah ke arah yang lebih baik. Perbaikan ke kondisi yang lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita semua mendoakan agar wabah Covid 19 ini segera berakhir bilkhusus di bumi pertiwi ini,” ungkapnya mengakhiri.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# ***Mari Tetap Patuhi Protokol Kesehatan***

**Terkait Vaksin Covid-19,**

# Mufida: Utamakan Keselamatan Rakyat dan Harus Transparan Uji Klinisnya

Pemerintah juga harus terus menggenjarkan kampanye 3M dan melakukan pengawasan pelaksanaan 3M tersebut di berbagai sektor. Apalagi penambahan kasus baru harian masih cukup tinggi dengan rata-rata diatas 3000 kasus per hari

## **Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (28/10) — Pemerintah akhirnya menyampaikan penundaan target dimulainya vaksinasi Covid-19 dari rencana semula. Awalnya pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 akan dimulai bulan November secara terbatas dengan target awal adalah para petugas medis yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19, juga kepada prajurit TNI, Polri, Satpol PP dan aparat penegak hukum yang berada di lapangan dalam pengendalian Covid-19 serta pasien dengan komorbid.

Bahkan Pemerintah sudah menargetkan penyediaan 376 juta vaksin sampai dengan akhir 2021 dengan target

vaksinasi untuk 160 juta orang.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyambut baik penundaan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini karena masih menjadi kontroversi di masyarakat.

Bahkan Mufida juga meminta Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serta betul-betul melalui pertimbangan yang matang dari berbagai aspek.

"Harus dipastikan bahwa vaksin yang akan sudah layak sesuai ketentuan ilmiah," kata Mufida di Jakarta, Rabu (28/10).

Mufida menerangkan,

untuk vaksin yang sudah terjalinkan kerjasama dengan PT. Biofarma dan Sinovac, sampai saat ini masih dalam tahap uji klinis tahap 3 yang bertujuan untuk melihat efektivitas dalam mencegah Covid-19. Itupun pelaksanaannya terlambat dibanding dengan beberapa negara lain.

Sementara analisa interim dari uji klinis tahap 3 ini paling cepat baru bisa selesai di Desember dan analisis totalnya paling cepat baru bisa selesai di bulan Maret 2021.

"Artinya Badan POM sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan izin penggunaan vaksin baru bisa mengeluarkan izin tersebut setelah semua proses analisis selesai dan vaksin dinyatakan aman dan efektif," ungkap Mufida.

Bisa saja Badan POM mengeluarkan Emergency Used Authorization (EUA) agar vaksin bisa segera digunakan untuk kepentingan mendesak. Namun untuk mengeluarkan EUA ini mensyaratkan adanya follow up dua bulan pasca injeksi terhadap objek yang telah



diinjeksi dua kali.

Dan persyaratan ini yang belum dipenuhi dari uji klinis tahap 3. Sehingga penundaan pelaksanaan vaksinasi ini merupakan langkah yang tepat.

Namun lebih dari itu, Mufida meminta agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tidak perlu tergesa-gesa jika keamanan dan efektivitas vaksin tersebut belum teruji.

Demikian pula dengan vaksin yang akan diimpor langsung dalam bentuk jadi, mengingat pemerintah juga telah melakukan peninjakan pembelian dari beberapa produsen vaksin Covid-19. Meskipun vaksin tersebut dinyatakan aman, namun perlu ada pembuktian efektivitasnya.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](https://fraksi.pks.id)

# Fikri Faqih: Harus Ada Terobosan Bangkitkan Sektor Pariwisata

kehadiran protokol kesehatan ini diharapkan dapat mendukung rencana pembukaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara bertahap. Sehingga dapat menggerakkan kembali usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, sektor yang paling terdampak dari pandemi Covid-19

## Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Semarang (30/10) — Tak bisa dipungkiri, industri sektor pariwisata mengalami dampak yang sangat buruk akibat pandemi Covid-19. Ya, adanya pembatasan sosial hingga karantina wilayah membuat pelaku industri pariwisata gigit jari.

Padaحال sebelumnya devisa pariwisata lebih unggul dibandingkan dengan minyak dan gas. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat menggelar Bimbingan Teknis pengenalan dan promosi wisata pertemuan, insentif, konvensi dan pameran dengan penerapan protokol di Hotel Premier Rabu (21/10/2020).

Fikri menyebut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menyatakan harus ada terobosan dalam membangkitkan sektor pariwisata terdampak oleh pandemi Covid-19.

"Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf, Muhammad Neil El Himam, menyebut adanya tur virtual diharapkan bisa menjadi solusi bagi wisatawan tetap mendapatkan pengalaman berwisata namun tetap aman," jelasnya.

Politisi Fraksi PKS itu menambahkan bahwa sektor

pariwisata adalah sektor yang paling terpuruk. Padahal sebelum pandemi, kontribusi devisa tersebut mengalihkan oil dan gas.

"Bahkan di tahun 2017 sektor pariwisata sempat diurutkan kedua dalam kontribusi devisa. Namun, memasuki awal 2020 kondisinya langsung terpuruk luar biasa. Seperti diantaranya bisnis perhotelan hingga tempat wisata lainnya," ungkapnya.

Namun, mau tidak mau semua penyelenggara wisata ini harus mengikuti apa anjuran pemerintah di tengah pandemi ini. Dan tentunya harus memiliki terobosan.

"Seperti dalam kegiatan meeting di tengah pandemi. Wajib menggunakan prokes. Diantaranya sebelum acara, peserta wajib dilakukan rapid. Dan jika ada peserta yang bersuhu tinggi, maka panitia wajib menolaknya," ungkapnya.

Kemudian, harus pakai masker dan jaga jarak termasuk 3M. Dan inilah salah satu cara membangkitkan. Terlebih sudah terbit prokes di sektor pariwisata.

"Kalau menurut WHO, meeting di dalam ruangan tingkat



parapan 6 persen. Sementara di luar ruangan (out dor) lebih ringan. Tapi tetap menggunakan prokes," ungkapnya.

Fikri juga menyebut prokes di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) juga telah resmi disahkan oleh Pemerintah RI. Protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disusun berlandaskan atas tiga isu utama. "Yakni kebersihan, kesehatan, dan keamanan," katanya.

Sementara terhadap upaya pemulihara pariwisata, baik

itu yang lazer maupun bisnis itu harus segera digerakan.

"Contoh, di sektor Pariwisata di Kota Tegal sejak 1 Oktober 2020 hingga kini tutup. Itu merupakan tindakan nyata. Namun kami melihat berarti di sini Kota Tegal belum memiliki skema bagaimana agar berjalan di tengah pandemi," tegasnya.

Sebab, di sini banyak sisi-sisi yang harus diperhatikan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Terkait Zakat sebagai Pengurang Pajak,

# Anis: Pelaksanaannya Perlu Kajian Mendalam

Untuk kondisi Indonesia saat ini, dengan menimbang berbagai konsideran konstitusi dan UU yang berlaku, maka diperlukan objektifikasi dengan berbagai konsideran yang kontekstual, dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang terbesar

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (31/10) -- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyampaikan pandangannya terkait zakat pengganti pajak.

Anis menyampaikan bahwa wacana mengenai zakat sebagai pengganti pajak sudah sejak lama menjadi diskusi dikalangan akademisi dan pemangku kebijakan.

"Kebijakan publik terkait zakat sebagai pengurang pajak selain berkaitan dengan masalah substansi akademik, juga dominan berkaitan dengan keputusan politik dari pemerintah dan stakeholder terkait," papar Anis.

Anis menjelaskan bahwa

dalam khazanah Islam, telah dijelaskan bahwa dalam konsep keuangan publik Islam klasik, posisi zakat adalah menjadi bagian utama dari penerimaan Baitul Maal yang dialokasikan secara terikat untuk para penerima.

Dan dalam perkembangan mutakhir, imbuh Anis, berbagai negara muslim menetapkan zakat dengan kondisi yang beragam dari yang bersifat mandatory sampai voluntary.

"Dalam konteks NKRI, pengelolaan zakat (sebagaimana dituangkan dalam UU Pengelolaan Zakat) sampai hari ini masih mengemuka paradigma voluntary dan

memberikan partisipasi masyarakat untuk mendirikan LAZ," kata Anis melanjutkan penjelasannya.

Jika mengacu pada khazanah awal keuangan publik Islam, katanya, maka kecenderungannya akan mengintegrasikan zakat pada keuangan publik negara.

"Adapun untuk kondisi Indonesia saat ini, dengan menimbang berbagai konsideran konstitusi dan UU yang berlaku, maka diperlukan objektifikasi dengan berbagai konsideran yang kontekstual, dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang terbesar," ungkapnya

Dalam pandangan Anis, tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini untuk menerapkan zakat sebagai pengganti pajak diantaranya : kondisi penerimaan negara dan terutama penerimaan perpajakan yang sangat berat, membuat kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, langsung dipersepsi pemerintah akan mengurangi penerimaan negara.

"Selain itu, tuntutan dari



pelumuk agama lain atas kewajiban keagamaan yang sejenis untuk mendapatkan equal treatment juga menjadi tantangan lain. Dan pelaksanaan Keuangan Negara (APBN) dan Keuangan Sosial Islam yang belum sinergis atau terintegrasi, menjadi tantangan tersendiri," ujar Anis.

Terakhir, Anis memberikan catatan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak membutuhkan kajian kebijakan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan keragaman serta perlu analisis yang lebih detail. Kebijakan zakat sebagai pengurang pajak

juga membutuhkan political will dan dukungan penuh dari pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik serta stakeholder lainnya. Sinergi dan integrasi yang lebih mendalam antara keuangan publik negara dengan keuangan sosial Islam, juga sangat diperlukan.

Selain itu, kata Anis, Pemerintah perlu membuat disain perencanaan pembangunan nasional dan sinergi optimal yang kokoh untuk optimalisasi dan sinergi seluruh potensi keuangan negara.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](https://fraksi.pks.id)

*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*





# Anggota Baleg Minta Drama Pasal 46 UU Migas dalam RUU Ciptaker Diusut Tuntas

Ini soal penting yang harus dijawab, agar praktek bernegara kita, khususnya pembentukan perundang-undangan dapat terus kita jaga dan pelihara sebagai proses perwujudan kekuasaan legislatif yang 'sakral'. Ini adalah soal marwah DPR RI dan bahkan kalau kita mau tarik ke atas secara lebih serius, ini adalah soal 'kesucian' kehidupan demokrasi kita

## Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Baleg DPR RI

Jakarta (28/10) — Anggota Badan Legislatif DPR RI, Mulyanto meminta insiden dicantumkan Pasal 46 UU Migas dalam RUU Cipta Kerja diusut tuntas.

Menurut Mulyanto, tindakan menambahkan, mengurangi atau mengubah naskah RUU yang sudah disahkan adalah pelanggaran hukum yang serius. Untuk itu Wakil Ketua Fraksi PKS ini minta, agar masalah ini

dituntaskan.

"Yang jadi pertanyaan apakah dimasukkannya pasal tersebut dalam naskah 5 Oktober setelah disahkan di sidang paripurna DPR adalah perbuatan sengaja atau sekedar soal kelalaian. Karena di hari terakhir Panja RUU Ciptaker, sebelum diambil keputusan tingkat satu dalam Pleno Baleg bersama Menteri terkait, pasal tersebut telah disepakati untuk drop.

Namun kenapa pasal tersebut bisa muncul kembali bahkan setelah RUU Ciptaker disahkan di Rapat Paripurna?" tanya Mulyanto.

Mulyanto menilai penambahan pasal 46 UU Migas ini yang menjadi pangkal utama dari serangkaian masalah revisi naskah RUU Cipta Kerja, yang ditengarai lebih dari 5 kali hingga berujung pada terbitnya naskah setting akhir dari Setneg. Pemerintah kembali mendrop pasal tersebut dari naskah RUU Ciptaker setebal 1187 halaman.

"Ini soal penting yang harus dijawab, agar praktek bernegara kita, khususnya pembentukan perundang-undangan dapat terus kita jaga dan pelihara sebagai proses perwujudan kekuasaan legislatif yang 'sakral'. Ini adalah soal marwah DPR RI dan bahkan kalau kita mau tarik ke atas secara lebih serius, ini adalah soal 'kesucian' kehidupan demokrasi kita," tandasnya.

Kalau naskah sepingting itu, imbuhnya, sebagai output



dari proses formal pembentukan perundang-undangan yang legal, saja tidak luput dari kelalaian atau kesengajaan.

"Dan kemudian muncul drama berupa gonta-ganti naskah secara ugul-ugalan di luar forum resmi persidangan. Maka apakah lagi prosesnya sendiri, yang lebih tidak terpantau publik," tegas Mulyanto.

Mulyanto minta pihak terkait menuntaskan masalah ini. Jangan sampai tindak ilegal ini berulang kembali, karena dapat menciderai nilai-nilai demokrasi.

"Sebelumnya pernah heboh kasus pembentukan

perundangan yang populer dengan sebutan 'ayat tembakau', dan mungkin juga ada kasus-kasus lain yang tidak terangkat ke publik," ungkapnya.

Karenanya, kata Mulyanto, ke depan perlu bagi kita untuk menuntaskan masalah ini. Kemudian menarik hikmahnya, agar di masa-masa yang akan datang tidak terulang kembali hal-hal yang memalukan seperti ini.

"Marwah DPR adalah marwah demokrasi. Ini wajib kita jaga bersama, agar kehidupan demokrasi politik kita dari hari ke hari semakin baik," tandas Mulyanto.

# Anggota Baleg: Waspada Pasal Karet di UU Cipta Kerja!

“Kami menduga munculnya ambiguitas terkait pengenaan sanksi berlapis untuk satu perbuatan dalam UU ini sesungguhnya tidak lepas sebagai akibat dari ketergesaan-gesaan selama proses penyusunannya

**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (30/10) — Anggota Baleg Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja menyimpan pasal karet pada salah satu pasalnya.

Temuan ini diperoleh setelah melakukan penyisiran pada Pasal 68 UU Cipta Kerja terkait perubahan beberapa ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

“Pada mulanya, Fraksi PKS mencermati pasal 68

merupakan concern utama kami, yakni terkait syarat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang harus kami pastikan adalah WNI dan muslim sebagaimana dalam UU No. 8/2019 (eksisting). Sebab sebelumnya, dalam draf RUU versi 1029

halaman, Pemerintah secara gegabah menghapuskan syarat muslim dan WNI tersebut dan menggantinya dengan klausul persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Pusat,” papar Bukhori mengawali penjelasannya.

Alhasil, Fraksi PKS bersikeras untuk mempertahankan syarat semula hingga akhirnya berhasil tarakomodir kendati harus melalui proses pembahasan yang alot di Baleg.

Namun di sisi lain, pembahasan perihal sanksi sayangnya dibahas oleh Pemerintah dan DPR secara terpisah, khususnya terkait sanksi pidana pada pasal 125 dan 126 UU No. 8/2019 dengan menambahkan batas waktu 5 hari, imbuhnya.

“Sebagai konsekuensi, di UU Cipta Kerja yang terbaru kemudian memunculkan pasal tambahan, yakni pasal 118A dan 119A sebagai pasal sisipan. Kedua pasal yang mengatur pengenaan sanksi administratif ini nyatanya memiliki kaitan dengan pasal 125 dan 126 terkait sanksi pidana sehingga memunculkan potensi sanksi berlapis,” ujarnya

Ketua DPP PKS ini menilai pasal sisipan tersebut sesungguhnya memiliki maksud yang baik, yakni memberikan proteksi kepada jemaah dari praktik penyimpangan pihak penyelenggara haji/umrah yang merugikan jemaah sebagaimana pernah terjadi sebelumnya pada kasus penipuan biro haji dan umrah First Travel.

“Namun anehnya, di dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 125 dan pasal 126 disebutkan bahwa PIHK maupun PPIU yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118A dan 119A juga bisa dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar,” keluhnya.

Sebagai informasi, pasal



118A dan 119A mencakup sanksi administratif, dari yang ringan yaitu berupa denda administratif sampai yang paling berat yakni pencabutan izin usaha. Selain itu, ditambah kewajiban pengembalian biaya yang sudah disetor oleh jemaah kepada PPIU dan/atau PIHK serta kerugian immateriil lainnya.

“Bila dicermati lebih lanjut, sebenarnya pasal 125 dan pasal 126 memiliki maksud yang absurd akibat definisinya yang tidak jelas. Karena tampaknya pembentukan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberlakukan sanksi pidana untuk menjerat PPIU/PIHK nakal, akan tetapi sangat

disayangkan rumusan pasalnya menjadi ambigu karena pasal rujukannya adalah 118A dan 119A yang berisi tindakan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, kegagalan, dan keterlantaran,” tukasnya.

Padahal, lanjutnya, terkait mekanisme sanksi dari tindakan tersebut sebelumnya sudah diatur dalam bentuk sanksi administratif, bisa dalam bentuk denda administratif sampai yang paling berat yakni pencabutan izin ditambah pengembalian setoran jemaah, katanya.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)

## Rayakan Maulid Nabi

# Nevi Zuairina Ajak Umat Implementasikan Akhlakul Karimah

Semua telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, dimana ummatnya perlu untuk meniru sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tidak mudah runtuh dimanapun ummat muslim berada

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang Pariaman (30/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina berkesempatan menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah di Masjid Kalapaian, Ampalu Tinggi Kecamatan Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (29/10/2020).

Peringatan Nabi yang bersamaan dengan kondisi masyarakat dunia dilanda wabah covid -19 yang hampir satu tahun melanda, juga diliputi dengan duka Kasus

penghinaan agama Islam di Prancis yang didukung oleh pimpinan negara tersebut.

Pada kesempatan maulid nabi di Padang Pariaman ini, selain dihadiri anggota DPR RI, juga hadir sebagai pembicara utama Gubernur Sumatera Barat (Sumbar).

"Kemampuan tauladan yang diberikan Rasulullah, mengajarkan seluruh ummat manusia untuk saling menghargai, menghormati dan egaliter. Semua kebiasaan buruk seperti melecehkan, merendahkan dan diskriminasi

telah di perjuangkan untuk di hilangkan dari kehidupan bermasyarakat", tutur Nevi Zuairina.

Politisi PKS ini sangat mengancam presiden prancis yang telah menimbulkan keresahan dunia dimana selama ini dunia telah kena musibah akibat wabah, malah di tambah memananya situasi secara psikologis telah menimbulkan gejala dunia islam.

Legiator asal Sumatera Barat II ini menyarankan, agar ummat muslim di dunia untuk selalu memegang teguh nilai-nilai kebaikan universal.

"Semua telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, dimana ummatnya perlu untuk meniru sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tidak mudah runtuh dimanapun ummat muslim berada," ungkapnya.

Ia menekankan pada perayaan moment maulid Nabi tahun ini, agar tak hanya sekedar menjadi perayaan hari besar umat islam saja, namun



judu sebagai cara untuk merefleksikan serta memotivasi setiap insan muslim, agar mampu mengimplementasikan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.

"Rasulullah adalah Negarawan dan Pemimpin sejati baik di masyarakat maupun keluarganya. Beliau adalah symbol ummat Islam. Segala prilaku, tindakan, perkataan bahkan diamnya beliau adalah hukum yang dipandu nilai-nilai wahyu. Semua ajarannya secara universal dapat diterapkan pada segala tempat dan segala zaman", kata Nevi.

Nevi yang duduk di Komisi VI DPR ini berharap, agar para penggerak negeri ini, mulai dari

pusat sampai daerah, mampu meneladani Rasulullah saw. Momen Maulid Nabi ini, dijadikan komitmen dalam diri masing-masing, untuk memiliki jiwa melayani, menjadi lebih baik di hari-hari berikutnya. Negara kita sangat memerlukan keteladanan.

"Keteladanan dengan moral sesuai budaya bangsa kita yang universal yang sesungguhnya sama persis dengan ajaran kebaikan yang dibawa Rasulullah. Ketika pemimpin baik, InshaAllah negeri Indonesia ini akan semakin diberkahi menuju bangsa yang baik dan bermartabat", tutup Nevi Zuairina.

## Grand Final Lomba Pidato Tokoh Bangsa, Ketua FPKS: Nilai-Nilai Keteladanan Harus Tersampaikan

Nilai-nilai keteladanan dari para tokoh bangsa harus tersampaikan, artinya kita para putra-putri bangsa Indonesia, apapun posisinya, harus meneladani para pahlawan dan tokoh yang sudah tidak bisa dihitung pengorbanannya untuk bangsa dan negara ini

### Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (27/10) – Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyampaikan harapan-harapan yang harus diteladani dan diselenggarakannya Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI

Hal ini disampaikan Jazuli dalam penutupan Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa 2020, Jakarta, Selasa (27/10) melalui virtual.

Jazuli menyampaikan bahwa Fraksi PKS selalu berada dalam tiga garis perjuangan yaitu Kaummatan, Kerakyatan dan Mengokohkan Nilai Nilai Nasionalisme Indonesia.

“Lomba ini merupakan salah satu contoh, bentuk kontribusi nyata FPKS yang diselenggarakan untuk seluruh rakyat Republik Indonesia,” ucap Jazuli

Fraksi PKS berharap dengan diselenggarakannya Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa ini menjadi pengakuan dan pengokohan sejarah bangsa bagi anak-anak muda khususnya dan juga untuk seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

Kemudian, dengan adanya lomba ini juga menjadi pembelajaran sejarah yang kuat, karena negara yang kuat adalah negara yang mempe-

lajari sejarah tokoh bangsanya dengan baik sehingga dapat mengambil pelajaran dari sejarah perjalanan dan pengorbanan para tokoh bangsa untuk kemajuan negara dimasa yang akan datang.

“Nilai-nilai keteladanan dari para tokoh bangsa harus tersampaikan, artinya kita para putra-putri bangsa Indonesia, apapun posisinya, harus meneladani para pahlawan dan tokoh yang sudah tidak bisa dihitung pengorbanannya untuk bangsa dan negara ini,” jelas Jazuli.

Dengan adanya lomba ini, Jazuli juga sangat berharap agar Indonesia menjadi



bangsa yang semakin kuat, kokoh, berdaulat dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Pada akhir penutupan Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa tersebut, Jazuli juga

berharap pidato-pidato hebat serta nilai nilai yang tersampaikan dalam lomba tersebut dapat terimplementasikan dalam berbangsa dan bernegara.

# Grand Final Lomba Pidato Tokoh Bangsa, Presiden PKS Tegaskan Islam dan Nasionalisme Satu Nafas Perjuangan

Lomba ini sangat penting untuk memberikan kesadaran sejarah kepada anak-anak muda atau generasi millennial bahwa Islam itu berkemajuan dan terbuka serta Rahmatan lil'alamiin

## H. Ahmad Syaikhul

Presiden PKS

Jakarta (27/10) — Presiden PKS, H. Ahmad Syaikhul, menyampaikan ungensi dari terselenggaranya kegiatan Grand Final Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa yang digelar Fraksi PKS DPR RI secara virtual, Selasa, (27/10).

"Lomba ini sangat penting untuk memberikan kesadaran sejarah kepada anak-anak muda atau generasi millennial bahwa Islam itu berkemajuan dan terbuka serta Rahmatan lil'alamiin," jelas Syaikhul.

Syaikhul sangat mengapresiasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI yang telah

menyelenggarakan Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa. Sebab dengan terselenggaranya kegiatan ini membuktikan bahwa banyak arus informasi kini yang memutarbalikkan fakta, sehingga FPKS hadir untuk menjawab isu-isu yang beredar tersebut dengan terselenggaranya kegiatan ini.

"Islam dan Nasionalisme ada dalam rahim yang sama, keduanya memiliki satu tarikan nafas yang juga sama," Ucap Syaikhul.

Syaikhul menyatakan, peran vital Islam dalam sejarah Republik ini tidak hanya

dalam BPUPKI akan tetapi jauh sebelum itu dan setelahnya kontribusi umat Islam tak terbantahkan. Hal tersebut terlihat jelas dari sejarah NU dan Muhammadiyah yang lebih panjang dan usia negeri ini.

Presiden PKS, H. Ahmad Syaikhul juga menegaskan bahwa PKS sebagai partai politik siap bersinergi NU, Muhammadiyah dan Ormas Islam yang lainnya dengan Ulama dan Umat Islam demi memajukan dan mensejahterakan tanah air.



# Gelar Grand Final Lomba Pidato Tokoh Bangsa, Fraksi PKS Teguh Membangun dan Merawat Indonesia

Sudah 16 tahun Fraksi PKS di DPR RI hidup bersama dengan seluruh elemen yang ada di dalam bangsa ini. Dalam perjalanannya, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja politik PKS merawat dan mencintai Indonesia.

## Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T

sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (27/10) — Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa, menyatakan bahwa PKS senantiasa berjuang untuk memberi kontribusi terbaik dalam membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya.

Hal ini disampaikan dalam agenda Grand Final Lomba Biografi Tokoh Bangsa Fraksi PKS melalui platform zoom, di Jakarta, Selasa (27/10).

"Sudah 16 tahun Fraksi PKS di DPR RI hidup bersama dengan seluruh elemen yang ada di dalam bangsa ini. Dalam perjalanannya, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, menjadi satu bagian yang tidak

terpisahkan dari kerja-kerja politik PKS merawat dan mencintai Indonesia", tegas Ledia.

Ini menambahkan, Fraksi PKS selalu bersama rakyat dalam melaksanakan setiap kerja di bawah politiknya.

"Kami yakin seluruh elemen telah memberikan support, sehingga PKS dalam kerja-kerjanya tetap berada dalam koridor untuk membangun, merawat, dan mencintai Indonesia. Kami menilai, ini adalah bagian terpenting dari tugas kami utk menjadikan Indonesia tegak dan kokoh", lanjutnya.

Menurutnya, salah satu bentuk konkret untuk

memwujudkan Indonesia lebih baik ialah dengan merawat ingatan bangsa atas jasa-jasa para pahlawan, sekaligus meniadakan sikap mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Fraksi PKS menyadari betul 92 tahun sumpah pemuda, tentu ada langkah-langkah yang lebih dahulu dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan negeri ini. Kami menghormati tokoh tokoh yg membangun masyarakat, memporjuangkan kemerdekaan negeri ini, dan memporjuarkannya", ungkap Ledia



Selain itu, menurut Ledia, lomba tokoh biografi ini dimaksudkan untuk mengkokohkan niat setiap elemen bangsa untuk terus menggalai khazanah tinta emas sejarah guna membangun peradaban negeri ini yang lebih baik

"Kegiatan lomba tokoh biografi ini adalah bagian dari upaya untuk tidak melupakan jasa para ulama, menghargai pahlawan negeri ini, dan merawat sejarah", pungkash anggota DPR RI Dapil Jawa Barat ini



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Grand Launching  
Minang Youth Forum

# Nevi Zuairina Bicara Peran Politik Perempuan PKS

Anak-anak muda sekarang harus memulai untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam segala aktivitas termasuk latihan berorganisasi dan bermasyarakat. Ini akan sangat membantu ketika terjun di dunia politik akan menemui berbagai hal yang mirip-mirip organisasi anak muda, mulai dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi atau dari tingkat RT hingga nasional

**Hj. Nevi Zuairina**  
Anggota Komisi VI DPR RI

## Grand Launching Minang Youth Forum

# Nevi Zuairina Bicara Peran Politik Perempuan

bahwa setiap perempuan memiliki potensi diri yang hendaknya selalu dipupuk serta ditingkatkan melalui pendidikan dan belajar dari pengalaman, sebagai modal dasar dalam melaksanakan semua peranannya mulai dari spiritualnya, intelektualnya, moralnya, fisiknya hingga amal atau operasionalnya

### Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (26/10) — Pada acara Grand Launching Minang Youth Forum yang mengusung tema Mewujudkan Mimpi Anak-Anak Muda, Anggota DPR RI asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina berbicara tentang integritas yang selalu menjadi pegangan untuk menyempurnakan persiapan anak-anak muda jaman sekarang untuk menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang.

Nevi juga memberikan contoh berbagai kiprah kaum perempuan di dunia politik yang dilakukan secara pribadi

maupun yang juga diperankan rekan-rekannya.

Banyak kiprah perempuan PKS termasuk dirinya dari sisi advokasi masyarakat, peran legislasi, peran menyusun anggaran negara hingga pengawasan semua sektor kinerja pemerintah yang telah dibayai negara.

"Anak-anak muda sekarang harus memulai untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam segala aktivitas termasuk latihan berorganisasi dan bermasyarakat. Ini akan sangat membantu ketika terjun di

dunia politik akan menemui berbagai hal yang mirip-mirip organisasi anak muda, mulai dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi atau dari tingkat RT hingga nasional. Tentunya kepercayaan diri ini perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan. Dengan Sekolah, Kursus, Pelatihan, hingga berorganisasi akan menempa tiap peribadi menjadi sosok tangguh dalam kepemimpinan", jelas Nevi.

Politisi PKS perempuan ini menekankan, bahwa yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan sikap dan kualitas diri kita dengan memegang teguh kejujuran, solidaritas, empati dan saling tolong menolong dalam bingkai gotong royong.

Nevi juga menyampaikan kepada forum anak-anak muda minang ini untuk memperkuat kiat kiat menjadi pemimpin integritas di masa depan dengan mencontoh sifat rasul saw yakni, shidiq (jujur), tabligh (Menyampaikan atau pandai berkomunikasi), amanah (dapat dipercaya) dan fathonah



(cerdas).

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun", kutip Nevi.

Anggota Fraksi PKS ini merujuk dari apa yang sudah dikerjakannya sebagai politisi perempuan, bahwa berpolitik bagi perempuan adalah bagian dari amal sholehnya sebagai anggota masyarakat dalam upaya memperhatikan urusan umat dari semua bidang, serta menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih.

Nevi mengatakan, bahwa setiap perempuan memiliki potensi diri yang hendaknya

selalu dipupuk serta ditingkatkan melalui pendidikan dan belajar dari pengalaman, sebagai modal dasar dalam melaksanakan semua peranannya mulai dari spiritualnya, intelektualnya, moralnya, fisiknya hingga amal atau operasionalnya. Ketika Semua mengalami perbaikan secara norma, maka peran-peran poli-tik yang dijalankan akan men-dapati manfaat yang mampu disebarkan ke seluruh masyarakat.

"Jangan sekali-kali menggantungkan keberhasilan kepada orang lain. Keberhasilan harus kita raih sendiri. Bahkan frame yang harus di bangun adalah, bagaimana kita mencapai keberhasilan agar mampu memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat banyak", tutur Nevi Zuairina



## Tingkatkan Partisipasi Pendidikan Masyarakat

# Netty Bagikan Beasiswa

Tujuan beasiswa ini berorientasi pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Ketika aksesnya terbuka, maka pencapaian angka partisipasi kasar (APK) semakin meningkat.

### Dr. HJ. NETTY PRASETIYANI, M.SI

Anggota Komisi IX DPR RI

Cirebon (28/10) — Pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia. Pada satu sisi proses pembelajaran harus tetap berlangsung, namun di sisi yang lain masyarakat harus menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI, Dapil Jabar VIII, Netty Prasetyani.

"Saya dipercaya oleh masyarakat Cirebon dan Indramayu untuk menjadi wakil mereka di DPR. Banyak aspirasi yang saya terima mulai dari ekonomi, ketenagakerjaan, keluarga, kesehatan hingga pendidikan. Alhamdulillah, di masa pandemi ini, saya bisa turun ke Dapil lagi untuk menyerahkan beasiswa

pendidikan kepada masyarakat", ujar Netty saat menyerahkan beasiswa PIP aspirasi untuk jenjang SD hingga SMA di Cirebon dan Indramayu.

"Saya harus sampaikan bahwa tidak ada potongan sepeser pun dari bantuan beasiswa yang diterima. Tujuan beasiswa ini berorientasi pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Ketika aksesnya terbuka, maka pencapaian angka partisipasi kasar (APK) semakin meningkat", tambah Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Permasalahan IPM, imbuhnya, harus menjadi perhatian untuk segera dituntaskan. Berdasarkan capaian skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019, kota Cirebon mendapatkan skor 74,35 poin dan merupakan skor terbaik di wilayah III Cirebon. Sedangkan

Kabupaten Cirebon mencapai sebesar 68,69 poin dan Kabupaten Indramayu sebesar 66,97 poin.

"Peningkatan kualitas dan standar hidup masyarakat merupakan tugas bersama antar sektor terkait. Harus ada kerja bersama meningkatkan standar pendidikan, kesehatan dan penghidupan masyarakat. Pendidikan termasuk yang harus kita selesaikan dan akselerasi demi mewujudkan SDM yang unggul dan berkualitas," ungkap Doktor Ilmu Pemerintahan ini.

Terakhir, Politisi PKS ini menutup dan berpesan kepada para siswa agar tetap rajin belajar dan jangan patah semangat oleh keadaan, pasti Allah SWT memberikan jalan bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencari ilmu.

"Para pendidik juga harus terus berinovasi bagi pendidikan Indonesia. Kembangkan kompetensi peserta didik yang relevan di masa depan, jangan alergi dengan perubahan dan tentu saja kolaborasi dengan kearifan lokal. Dengan itu, kita tingkatkan indeks kompetensi dan literasi anak-anak Indonesia agar bisa bersaing di kancah global di masa mendatang" Tutupnya



# Terima Aspirasi Mahasiswa Sumsel Aleg PKS: Mari Kritisi dan Kawal UU Ciptaker

Mahasiswa perlu untuk terus kritis dan rasional untuk mengawal berjalannya UU Ciptaker. Sila sandingkan pasal-pasal yang ada dengan konstitusi negara kita. Temu-kan, kritisi, lalu sebarkan kepada rakyat”

## H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (27/10) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal, menerima aspirasi dari aliansi mahasiswa Sumatera Selatan terkait sikap penolakan atas Omnibus Law RUU Cipta Kerja melalui platform virtual, di Jakarta, Selasa (27/10).

Dalam kesempatan ini, Mustafa Kamal menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah peduli terhadap dinamika berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mengawal RUU Cipta Kerja.

"Mahasiswa adalah tonggak demokrasi di negara ini. Maka dari itu, peran mahasiswa dalam kehidupan

demokrasi Indonesia sangat penting dan relevan untuk memberi masukan yang konstruktif dan kritis terhadap kebijakan negara", jelas Mustafa Kamal.

Ia pun meminta mahasiswa untuk menggali kembali rumusan-rumusan pasal dalam UU Cipta Kerja yang berpotensi merugikan bagi kedaulatan bangsa, kelestarian alam, ataupun kesejahteraan buruh.

"Mahasiswa perlu untuk terus kritis dan rasional untuk mengawal berjalannya UU Ciptaker. Sila sandingkan pasal-pasal yang ada dengan konstitusi negara kita.

Temukan, kritisi, lalu sebarkan kepada rakyat", ungkap anggota DPR Dapil Sumsel ini.

Selain itu, Mustafa Kamal menegaskan bahwa PKS akan terus membersamai rakyat, termasuk mahasiswa, dalam setiap kerja-kerja politik yang dilakukan di parlemen.

"Insyallah, PKS akan senantiasa mengutamakan aspirasi dan masukan rakyat. Dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja, kami mengambil sikap untuk menolak karena kami berkeyakinan itu adalah suara rakyat", pungkas Mustafa Kamal.



# Legislator PKS Minta BUMN Alokasikan PKBL untuk Bantu Guru Terdampak Pandemi

“Guru atau kalangan pendidik merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa. Sudah sewajarnya jika BUMN ikut membantu ekonomi guru

## AMIN AK,M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Jember (28/10) — Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalokasikan dana lebih besar untuk membantu guru yang kini kesejahteraannya terdampak pandemi Covid-19.

Program bantuan ekonomi dan kesejahteraan guru, kata Amin, bisa memanfaatkan dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN.

“Guru atau kalangan pendidik merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa. Sudah sewajarnya jika BUMN ikut membantu ekonomi guru,” ujar Amin saat mengunjungi Muhammadiyah Boarding School di Kecamatan Tanggul Jember, Jawa Timur, Rabu (28/10).

Dalam kunjungan tersebut, Amin bertemu dengan Pengurus Muhammadiyah Ranting Tanggul, dan Dewan Guru MBS Tanggul.

Amin menyerap banyak aspirasi dari kalangan pendidik di Lingkungan Lembaga Muhammadiyah di Jember.

Dalam kesempatan tersebut, Amin siap mendorong Gerakan BUMN Peduli Guru yang kesejahteraannya terdampak hebat selama pandemi Covid.

Anggota Komisi VI DPR RI itu juga akan berkontribusi bagi pengembangan lembaga pendidikan MBS Jember melalui Program CSR atau lebih dikenal dengan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN.

Terlebih, imbuhnya, pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang andal. Tidak

mungkin visi Indonesia maju yang digaugkan pemerintah bisa berhasil tanpa dukungan SDM yang mampu menjadi solusi permasalahan bangsa. Karena itu, kesejahteraan guru termasuk guru swasta atau honorer harus menjadi perhatian serius.

“Insya Allah, kami akan sampaikan ke Menteri BUMN agar ada program bantuan ekonomi dari BUMN untuk para guru dan guru ngaji. Terlebih dampak pandemi terhadap perekonomian rakyat diperkirakan cukup lama,” ujar Amin.

Bantuan ekonomi tersebut bisa disalurkan bervariasi, baik dalam bentuk sembako, uang tunai ataupun bantuan permodalannya untuk usaha produktif yang dikelola keluarga guru.

Terakhir Amin berharap, Kementerian BUMN cepat tanggap guna meringankan beban ekonomi para guru terutama bagi yang terdampak pandemi.



# Bukhori Salurkan BLT bagi Tokoh Masyarakat dan Guru Ngaji di Kota Semarang

“Meskipun tidak banyak sumbangsih yang bisa kami lakukan, kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban mereka. Selain itu, yang terpenting adalah menghadirkan kesadaran bagi mereka bahwa masih ada pihak yang senantiasa memperhatikan dedikasi mereka

## KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Semarang (28/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 300 ustaz dan guru ngaji di Kota Semarang di masa reses.

Penyaluran bantuan dengan total nilai sebesar Rp 150 juta rupiah tersebut berhasil terselenggara atas kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Anggota Komisi VIII ini mengatakan, masih banyak masyarakat yang menganggap profesi ustaz ataupun guru ngaji

merupakan pekerjaan filantropis (kerelawanan) sehingga acapkali diabaikan kesejahteraan mereka.

Padahal, tidak sedikit diantara para guru ngaji ini harus bersusah payah menutupi biaya operasional dakwah mereka dengan melakukan pekerjaan sambilan di sektor informal seperti berjualan maupun aktivitas lainnya.

“Akibat yang ditimbulkan Covid-19 membuat keadaan para guru ngaji ini semakin terhimpit karena sekolah

diliburkan dan aktivitas belajar secara tatap muka sangat dibatasi. Otomatis, sebagian di antara mereka yang biasa mengandalkan penghidupan dari apresiasi orangtua siswa akan kehilangan sumber pendapatan,” tutur Bukhori saat acara serah terima bantuan bertempat di MD Building, Kota Semarang, Jumat (23/10/2020).

Selain mengalami kesulitan untuk biaya operasional dakwah mereka, lanjutnya, di sisi lain mereka juga memiliki keluarga yang harus dihidupi.

“Pada ruang inilah semestinya Negara hadir dalam memberikan solusi, apalagi dedikasi mereka dalam ranah pendidikan sejatinya menyangkut urusan dunia-akhirat, ujar Bukhori.

Bukhori menuturkan, dalam hal teknis penyaluran kepada sasaran, pihaknya turut menggandeng, organisasi Ikatan Dai Indonesia Kota Semarang (IKADI) supaya lebih terorganisir dan tepat sasaran.



“Meskipun tidak banyak sumbangsih yang bisa kami lakukan, kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban mereka. Selain itu, yang terpenting adalah menghadirkan kesadaran bagi mereka bahwa masih ada pihak yang senantiasa memperhatikan dedikasi mereka,” sambungnya.

Sejujurnya, demikian lanjutnya, bantuan langsung tunai ini tidak sepadan bila dibandingkan dengan sumbangsih yang telah diberikan para guru ngaji kita

terhadap anak-anak Indonesia dalam rangka menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagaimana hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang termaktub dalam konstitusi.

“Dalam rangka mendukung amanah konstitusi tersebut, kita berencana untuk terus melanjutkan model bantuan seperti ini di waktu mendatang. In shaa Allah, jika ada kesempatan” pungkas Anggota Baleg ini.

# Hermanto Serahkan 60 Ekor Sapi untuk Peternak di 3 Daerah

Beri makan yang banyak dan jaga kesehatannya dengan pemberian obat-obatan yang sesuai agar badannya gemuk dan subur sehingga bisa beranak setiap tahun, Anak-anak sapi yang lahir tersebut itulah yang bisa dijual oleh peternak. Siapa merawat dengan baik maka dia akan mendapat hasil yang baik juga

**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Padang (28/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan melakukan roadshow menyerahkan 60 ekor sapi kepada peternak di Kota Padang, Kota Solok dan Kabupaten Solok.

Sapi-sapi tersebut, menurut Hermanto merupakan bantuan Pemerintah dalam Program Pengembangan Ruminansia Potong 2020.

"Program ini merupakan salahsatu upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para peternak," jelas Anggota DPR RI

dari Dapil Sumbar I ini.

Para peternak penerima bantuan tersebut adalah mereka yang tergabung dalam 3 kelompok ternak (Poknag) yaitu: Poknag Lapau Munggu, Kampung Guo, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang; Poknag Keluarga Saiyo, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok; Poknag Kandih Maju Bersama, Jorong Linjuang Koto Tinggi, Nagari Koto Gaek Guguaq, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Masing-masing kelompok tersebut mendapatkan 20 ekor

sapi.

Hermanto meminta kepada peternak tersebut agar sapi-sapi tersebut dirawat dengan baik.

"Beri makan yang banyak dan jaga kesehatannya dengan pemberian obat-obatan yang sesuai agar badannya gemuk dan subur sehingga bisa beranak setiap tahun", papar legislator dari FPKS ini.

"Anak-anak sapi yang lahir tersebut itulah yang bisa dijual oleh peternak. Siapa merawat dengan baik maka dia akan mendapat hasil yang baik juga," pungkas Hermanto.



## Reses Di Kota Tual

# Saadiah Temukan Banyak Desa Belum Teraliri Listrik

“Masyarakat pedesaan sangat membutuhkan listrik. Ketergantungan pada energy listrik sangat besar. Selain sebagai penerangan juga fasilitas utama penunjang kehidupan mereka”,

### SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi VII DPR RI

Tual (28/10) — Ketersediaan dan akses masyarakat pedesaan terhadap jaringan listrik di Propinsi Maluku, terutama di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara masih menyisakan masalah.

Pemerintah menggambar-gambarkan Rasio Elektrifikasi (RE) pada semester 1 tahun 2019 mencapai 98,81% dan RE mendekati 100 % pada tahun 2020, namun faktanya, banyak desa di Maluku yang belum terlistriki.

“Pertumbuhan listrik nasional disebut meningkat. Tapi akses listrik pedesaan di Maluku banyak yang belum terpenuhi”, buka Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty, di Tual (28/10).

Penegasan ini disampaikan Saadiah dalam temuannya pada kunjungan Reses di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Ia mencontohkan, ketika mendatangi kecamatan Tayando Tam Kota Tual, ada 4 (empat) desa yang masyarakatnya belum menikmati listrik.

“Empat desa di Kecamatan Tayando Tam Kota Tual belum teraliri listrik. Desa – desa tersebut gulita di malam hari”, sebut anggota Fraksi PKS dari Dapil Provinsi Maluku ini.

Keterbatasan akses listrik pedesaan juga terjadi di kecamatan lainnya di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Ini menjadi problem

tersendiri.

“Masyarakat pedesaan sangat membutuhkan listrik. Ketergantungan pada energy listrik sangat besar. Selain sebagai penerangan juga fasilitas utama penunjang kehidupan mereka”, imbuhnya.

Saadiah membuka, rencana pengembangan listrik desa telah dimulai lewat PLTD Listrik Desa UP3 Tual. Terdapat 15 lokasi listrik desa yang telah selesai dibangun, 4 lokasi dalam progress pembangunan dan 3 lokasi yang menjalin KSO dengan Pemerintah Kabupaten Aru.

“Power house dan jaringan listrik seperti pada 15 lokasi di atas sudah dibangun sejak 2018. Pemerintah daerah sudah melaksanakan kewajibannya yaitu hibah lahan di lokasi pembangunan power house dan jaringan. Tetapi mesin pembangkit tenaga diesel belum diwujudkan pemerintah pusat”, detail Saadiah.

Karena ada larangan pemerintah untuk pengadaan pembangkit diesel untuk listrik desa. Akibatnya, akses listrik



desa tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

Saadiah meminta, harus ada perhatian yang spesifik dari pemerintah untuk memastikan akses listrik desa di Tual, Maluku Tenggara maupun Kabupaten Kepulauan Aru dapat dipenuhi secara baik.

“Jika pengadaan pembangkit listrik diesel dilarang oleh pemerintah, lalu alternatifnya dengan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), harusnya terdapat perencanaan dan alokasi yang jelas untuk kepastian pemenuhan listrik desa tersebut”, kritiknya.

la memandang,

pelarangan terhadap penyediaan pembangkit listrik diesel, belum diikuti dengan komitmen pemerintah untuk membuka akses EBT bagi desa – desa tersebut.

“Apalagi ketersediaan sumber EBT di desa-desa yang nihil listrik untuk Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru sangat terbatas. Bahkan banyak desa yang tidak memiliki sumber daya EBT. Harus ada komitmen dan solusi yang tepat. Kalau tidak, sepanjang negara ini ada, desa – desa tersebut tetap gelap tanpa listrik,” sebut Saadiah mengakhiri.

## Reses Di Dapil

# Slamet dapat Apresiasi Warga karena Penolakan FPKS atas Omnibus Law

Jumlah anggota DPR yang menolak UU ini sangat sedikit dibandingkan dengan yang menyetujui, kita kalah jumlah. Itulah kenapa masyarakat harus sadar betul di Pemilu berikutnya pastikan memilih wakil rakyat yang benar-benar peduli dan akan memperjuangkan kepentingan rakyat

### drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (29/10) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet melakukan pertemuan di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi.

Pertemuan tersebut merupakan rangkaian dari agenda reses masa sidang kesatu tahun 2020/2021, Selasa (27/10/2020).

Dalam pertemuan yang dihadiri 50 orang warga dari berbagai kecamatan di Wilayah Selatan Sukabumi ini, Slamet

menyampaikan kiprahnya bersama Fraksi PKS di DPR RI dalam menolak Omnibus Law sejak masih berupa rancangan hingga ditetapkan menjadi Undang-Undang.

"Jumlah anggota DPR yang menolak UU ini sangat sedikit dibandingkan dengan yang menyetujui, kita kalah jumlah," papar Slamet dalam penyampaiannya.

"Itulah kenapa masyarakat harus sadar betul di Pemilu berikutnya pastikan memilih

wakil rakyat yang benar-benar peduli dan akan memperjuangkan kepentingan rakyat," tambahnya.

Jenal Wahyu, salah seorang peserta mengapresiasi sikap PKS tersebut.

"Kami, selaku masyarakat kecil menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada PKS atas perjuangan menolak UU Omnibus Law ini. Kami menyikikan bagaimana pembelaan PKS kepada rakyat



## Tinjau Sungai Kalimalang

# Anis Minta Pemprov DKI Lakukan Kajian Komprehensif Penanganan Banjir

“Kerjasama dan sinergi antara wakil rakyat dengan pemerintah provinsi sebagai pelaksana pembangunan, sangat baik untuk menyamakan persepsi dan menemukan solusi bersama permasalahan warga

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (29/10) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengisi kegiatan reses dengan turun ke daerah pilihannya di Jakarta Timur.

Anis meninjau titik rawan potensi banjir di bantaran sungai Kalimalang yang berlokasi di Jalan D. I. Panjaitan RT001/06, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Menurut ketua RT setempat, kawasan ini selalu terkena banjir dengan ketinggian mencapai 2-3 meter saat terjadi intensitas curah hujan yang tinggi.

Pada kegiatannya ini, Anis

turun ke lokasi bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

“Kerjasama dan sinergi antara wakil rakyat dengan pemerintah provinsi sebagai pelaksana pembangunan, sangat baik untuk menyamakan persepsi dan menemukan solusi bersama permasalahan warga,” tutur Anis.

Bersama dengan ketua RT, ketua RW, Lurah dan warga sekitar, Anis dan Wagub, didampingi Pengurus DPD PKS Jakarta Timur menyusuri bantaran sungai Kalimalang

untuk meninjau secara langsung penyebab banjir yang kerap terjadi di daerah ini.

Secara bergantian, warga menyampaikan aspirasi dan harapannya khususnya terkait dengan penanganan banjir.

Dalam kunjungan yang dilakukan sore hari itu, ditemukan sebuah kondisi dimana aliran sungai tertahan oleh jembatan yang sudah lama sejak zaman Belanda.

Jembatan yang relative kecil dan rendah itu, dinilai Anis, harus ditinggikan sehingga aliran air yang melewati jembatan tersebut bisa lebih besar volumenya.

“Jika tidak ada perbaikan akan menyebabkan genangan mulai dari tiga hingga lima meter, terutama saat kiriman air dari hulu cukup tinggi,” ungkapnya.

Menyikapi hal ini, Anis menyampaikan usulan langsung kepada Wagub DKI agar Pemerintah segera membuat kajian komprehensif



untuk penanganan banjir di wilayah ini.

“Kajian tersebut dibutuhkan mengingat mayoritas warga tidak ingin berpindah meninggalkan rumah dan tanah yang telah mereka tinggali puluhan tahun dan warga telah memiliki mata pencaharian di wilayah tersebut,” terang Anis.

Saran dari Anis direspon positif oleh Wagub DKI Jakarta yang menegaskan bahwa pihaknya melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) sudah mengidentifikasi hal tersebut dengan membuat berbagai codetan sekaligus melakukan pengerukan sungai, waduk dan embung untuk mengalirkan air, serta mengaktifkan kembali seluruh pompa yang ada.

“Hal tersebut dilakukan

tidak hanya saat musim hujan saja, namun juga saat musim kemarau dalam rangka mengendalikannya air,” tandasnya.

Disamping itu Pemprov DKI Jakarta tengah mengupayakan program pebaran sungai dengan tujuan memperluas volume tampungan air, sehingga warga di sekitar tidak perlu merasa khawatir tergenang air khususnya di Kelurahan Kebon Pala.

Dalam kunjungan yang di hadiri juga oleh Pelaksana Tugas Kepala BPBD DKI Jakarta Sabdo Kurnianto, Kadis SDA DKI Juaini Yusuf, serta Lurah Kebon Pala Faisal Rizal.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# Rofik Hananto Resmikan Sumur Bor Dalam di Banjarnegara

“Kami berharap agar keberadaan sumur ini dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang

## H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

Banjarnegara (30/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah VII, Rofik Hananto, meresmikan 4 titik sumur bor dalam di Kabupaten Banjarnegara pada Kamis, 29 Oktober 2020.

Peresmian dilakukan di salah satu titik sumur bor yang berlokasi di Komplek Yayasan Al Ukhuwah, di Desa Petambakan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara..

Hadir pada acara ini Anggota DPRD Propinsi Jateng Tri Mulyantoro, Camat Madukara Purwanto, Anggota DPRD Kab. Banjarnegara FPKS Wasid dan Achmad Salabi dan Kepala Desa dari Karangjati,

Purworejo Klampok, Kecepat dan desa Petambakan.

Rofik mengatakan bahwa pembangunan sumur bor dalam merupakan rangkaian program pengentasan daerah sulit air bersih.

“Program Sumur Bor Dalam adalah salah satu upaya Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR RI dalam membantu masyarakat khususnya untuk menyediakan air bersih di daerah rawan kekeringan.” Kata Rofik

“Program ini dirasakan efektif dan berhasil membantu mengatasi persoalan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di daerah

sulit air.” Tambahnya.

Ada 4 titik sumur bor dalam di Kabupaten Banjarnegara yang diresmikan, masing-masing berkedalaman sampai 125 meter: Desa Karangjati Kec. Susukan, Desa Purworejo Klampok. Desa Kecepat K. Punggelan dan Desa Petambakan Kec. Madukara.

Rofik berharap keberadaan sumur bor ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

“Kami berharap agar keberadaan sumur ini dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik, sehingga dapat



memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.” Pesan Rofik

Camat Madukara dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas bantuan yang disalurkan di Kabupaten Banjarnegara, khususnya di Kecamatan Madukara.

“Kami ucapkan terimakasih atas bantuan yang disalurkan di Kabupaten Banjarnegara. Khususnya di Kecamatan Madukara,

keberadaan sumur bor ini sangat bermanfaat. Kami mendokan pak rofik senantiasa sehat sehingga mampu menjalankan tugas dengan baik,” ungkapnya.

Senada dengan dengan Camat Madukara, Sekretaris Yayasan Al Ukhuwah, Supono mengatakan keberadaan sumur bor di Komplek Yayasan Al Ukhuwah sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, apalagi 2 tahun berturut-turut wilayah ini mengalami kekurangan air saat usim kemarau datang.

# Andi Akmal Berkunjung ke Kantor Bulog Kabupaten di Sulawesi Selatan

Bulog harus hadir untuk kepentingan masyarakat banyak. Ini menjadi penting karena kehadiran Bulog yang menggawangi persoalan pangan negara menjadi kunci strategis ketahanan pangan dari mulai tingkat negara hingga tingkat keluarga

**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Kabupaten Bone (30/10) — Setelah berkunjung ke kantor wilayah Bulog perwakilan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin meneruskan untuk kunjungan kerja ke kantor-kantor Bulog yang ada di kabupaten Bone.

"Bulog harus hadir untuk kepentingan masyarakat banyak. Ini menjadi penting karena kehadiran Bulog yang menggawangi persoalan pangan negara menjadi kunci strategis ketahanan pangan dari mulai tingkat negara hingga

tingkat keluarga", tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menilai bahwa Bulog saat ini masih kurang performa akibat beberapa persoalan yang mesti segera diselesaikan. Salah satunya adalah penguatan institusinya dimulai dari regulasi hingga kuasa anggarannya.

Politisi PKS ini menyampaikan, bahwa masyarakat saat ini sangat mengharapkan peran Bulog lebih dari yang saat ini. Ekspektasi masyarakat sangat tinggi yang mesti diimbangkan antara harapan dan kenyataan.

"Kami dari Komisi IV, hampir seluruh Anggota DPR RI lintas Partai mendesak pemerintah agar Bulog dikuatkan. Lakukan penambahan kewenangan dan anggaran. Dengan penguatan kewenangan melalui regulasi, dan dukungan anggaran dari APBN, Bulog nantinya akan menjadi institusi kokoh yang memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia," jelas Akmal menutup pembicaraan.



# Masa Reses, Syahrul Aidi Terima Aspirasi Petani Lima Desa di Singingi Hilir

Karena kasus ini sudah inkrah sebagian, maka kita upayakan untuk dibawa ke jalur politik. Kita upayakan masyarakat bertemu dengan pimpinan DPR RI. Kapan perlu kita bawa pimpinan DPR RI dan komisi terkait kesini dan bertemu dengan masyarakat secara langsung.

## H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

Kuansing (30/01) — Konflik lahan seakan menjadi momok berat di Provinsi Riau. Tak kurang dari 312 potensi konflik lahan di Riau. Salah satu yang rumit adalah konflik lahan antara PT. Wanasari dengan masyarakat 5 desa di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing.

erungkapnya konflik ini kembali dikemukakan oleh lima desa yaitu Desa Sumber jaya, Sungai Buluh, Simpang Raya yang bermasalah konflik lahan dengan PT. Wanasari seluas

905 hektar. Kemudian masyarakat Desa Pasir Mas, Sungai Keranji dengan PT Wanasari seluas 2.100 hektar.

Untuk menyikapi hal itu masyarakat lima desa tersebut meminta bantuan kepada Syahrul Aidi yang merupakan anggota DPR RI Dapil Riau 2.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di kantor Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir. Hadir juga pada saat itu anggota DPRD Kuansing Syafril dari Fraksi PKS-Hanura dan Jhonson

Sihombing dari fraksi Nasdem.

Kades Sumber Jaya Amran Mangunso mengawali masyarakat menyampaikan bahwa mereka sangat berharap dengan dukungan Syahrul Aidi di senayan. Dukungan seperti ini tidak didapatkan selama memperjuangkan hak mereka ini.

"Kasus antara masyarakat kami dengan Wanasari ini dimulai ketika tahun 1995 masyarakat banyak menanam kelapa sawit di lahan sengketa tersebut. Kemudian tiba PT Wanasari masuk juga pada tahun 1997 di lokasi yang berdekatan. Namun belum ada persoalan izin HGU antara kedua belah pihak. Persoalan baru muncul ketika tahun 2007, PT Wanasari mengklaim bahwa lahan yang dikelola oleh masyarakat ini merupakan masuk ke dalam izin konsesi HGU mereka. Tentu masyarakat panik," kenang Amran.

Tak lama berselang, pada tahun 2013, kasus sengketa ini masuk ke ranah hukum. Masuk ke PN Rengat dan Mahkamah Agung pada 2017. MA



memutuskan, dari 905 hektar lahan tersebut, yang masuk ke dalam HGU PT Wanasari adalah 411 hektar. Sedangkan sisanya masih distatus quokan.

Sementara Syafril dan Jhonson Sihombing bersepakat bahwa aspirasi masyarakat ini mereka kawal terus sampai mendapat status yang jelas.

"Doa kami bersama, pak Syahrul Aidi terus sehat, dipanjangkan umur dan dapat membantu warga yang sedang bermasalah ini," kata Jhonson.

Syahrul Aidi dalam sambutannya menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat Singingi Hilir diterima. Namun dia menyatakan tidak menjamin

masyarakat akan kembali menerima haknya tersebut karena ada proses rumit yang harus dilalui.

"Karena kasus ini sudah inkrah sebagian, maka kita upayakan untuk dibawa ke jalur politik. Kita upayakan masyarakat bertemu dengan pimpinan DPR RI. Kapan perlu kita bawa pimpinan DPR RI dan komisi terkait kesini dan bertemu dengan masyarakat secara langsung," kata Syahrul Aidi.

Usai berdialog dengan masyarakat, Syahrul Aidi diajak warga melihat langsung kebun mereka yang telah ditumbangkan oleh PT. Wanasari.

# Masa Reses, Aleg PKS Bersama Sekjen Kemenkes Kunjungi Puskesmas Ampera

Intinya kita (DPR dan Pemerintah) berupaya untuk melakukan percepatan penanganan dan meningkatkan fasilitas pelayanan di daerah daerah dalam rangka penanganan covid 19 ini.

## H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

Pontianak (01/11) — Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi melakukan kunjungan ke puskesmas Ampera, Sabtu (31/10/2020).

Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau tempat isolasi mandiri pasien covid 19 di puskesmas Ampera. Dimana kehadiran beliau juga dalam rangka memberikan dukungan moral kepada para pasien serta nakes yang sedang dirawat.

Kehadiran beliau disambut langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Pontianak, Sidiq Handanu dan beberapa staffnya.

"Kami menemani pak Sekjend, dalam rangka

kunjungan beliau ke Pontianak untuk melihat lihat puskesmas rawat jalan di ampera serta rusunawa," ujar Alifudin.

Beliau menambahkan bahwa sekjend juga baru saja mengunjungi RSUD Singkawang yang direncanakan akan menjadi rumah sakit rujukan covid 19 regional.

"Intinya kita (DPR dan Pemerintah) berupaya untuk melakukan percepatan penanganan dan meningkatkan fasilitas pelayanan di daerah daerah dalam rangka penanganan covid 19 ini. Tadi kita juga mengunjungi RS Kota yang rencananya akan dibangun lagi tahun 2021," tambah Alifudin



## Jakarta Raih Award Transportasi Dunia

# Mufida: Lanjutkan Inovasi Berorientasi Pelayanan

Award ini harus menjadi pemicu untuk terus melakukan inovasi dan juga perbaikan terus-menerus dalam memberikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau dan juga menjadi kebanggaan warga Jakarta

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (02/11) — Kota Jakarta meraih penghargaan bergengsi dunia dengan meraih peringkat 1 Sustainable Transportation Award 2021. Penghargaan ini sekaligus menjadikan Jakarta sebagai kota pertama di Asia Tenggara yang memenangkan penghargaan Sustainable Transportation Award (STA).

Jakarta dianggap paling berhasil dalam melakukan inovasi dan peningkatan mutu transportasi, peningkatan mobilitas transportasi kota dan upaya pengurangan polusi udara dan ketersediaan akses pesepeda dan pejalan kaki selama 1,5 tahun terakhir.

Anggota DPR dari Fraksi

PKS asal Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Kurniasih Mufidayati memuji pencapaian DKI Jakarta dalam meraih peringkat pertama STA 2021.

"Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras Pemprov DKI Jakarta dalam membenahi transportasi di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir, khususnya program integrasi antar moda transportasi publik," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Senin (02/11).

Mufida melihat, melalui program Jak Lingko, secara bertahap Pemprov DKI Jakarta berhasil mengintegrasikan berbagai moda transportasi

publik di Jakarta terutama dalam integrasi pembayaran maupun konektivitas antar moda.

Menurut Mufida, integrasi ini sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi pengguna transportasi publik, bahkan juga meringankan dari sisi biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Apalagi integrasi yang dilakukan juga mencakup integrasi pembayaran/ticketing, integrasi rute dan secara bertahap integrasi manajemen.

"Sehingga dengan integrasi ini, hal yang sebelumnya sulit dibayangkan seperti adanya standar pelayanan yang baik untuk angkat dan bus sedang serta naik angkat yang tidak perlu membayar. Demikian penyediaan jalur bersepeda dan jalur pedestrian yang luas membuat orang nyaman berjalan khaki," ujar dia.

Namun Mufida meminta agar Pemprov DKI Jakarta untuk terus melanjutkan inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan dalam transportasi publik di Jakarta dan terus memperbaiki



kekurangan yang masih ada dalam integrasi publik. Berbagai inovasi yang perlu terus dikembangkan terutama harus berorientasi pada pelayanan yang semakin baik bagi pengguna transportasi publik maupun warga Jakarta pada umumnya.

Menurut Mufida, transportasi publik sebuah kota akan akan menjadi salah satu cerminan kualitas pengelolaan kota tersebut serta kualitas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kotanya.

"Transportasi publik yang baik juga akan meningkatkan kualitas udara kota dan juga memberikan kesan yang baik

bagi pihak luar yang mengunjungi kota tersebut," kata dia.

Di masa pandemi saat ini maupun setelahnya yang membuat beban hidup masyarakat semakin berat, transportasi publik menjadi sangat diandalkan oleh warga Jakarta. Oleh karena itu, menurutnya transportasi publik di Jakarta juga harus memberikan rasa aman dan menjadi model dalam penerapan protokol kesehatan di transportasi publik untuk mencegah penularan covid-19.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](https://fraksi.pks.id)

# Ini Pesan Anggota DPR RI Sakinah Aljufri Bagi Penerima Beasiswa PIP di Sulteng

“Penyaluran beasiswa ini tidak ada istilah prioritas. Termasuk sekolah non muslim, jika memang dianggap berhak kami masukkan dalam daftar usulan untuk dapatkan beasiswa.

## Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

PALU – Anggota DPR RI Komisi X Sakinah Aljufri diberikan “jatah” 14 ribu lebih beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Beasiswa PIP itu disalurkan di Sulawesi Tengah yang merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) Sakinah.

Sakinah mengatakan, PIP tahap pertama sudah keluar nama-nama penerimanya. 14 ribu lebih beasiswa di tahun 2020 itu tersebar di seluruh Sulawesi Tengah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), sampai SMA dan SMK.

“Insha Allah awal November, akan keluar lagi nama-nama penerima PIP

tahap II,” kata Sakinah, saat Media Gathering bersama sejumlah jurnalis di Kota Palu, Sabtu (31/10/2020).

Kata Sakinah, dana PIP ini diberikan kepada siswa-siswi tertentu karena pertimbangan latar belakang ekonomi orang tua yang sangat membutuhkan.

Dalam penyalurannya, Sekjen Wanita Islam Alkhairaat ini, juga tidak memilih-milih sasaran siswa yang diberikan beasiswa. Yang dianggap berhak, yakni kelompok tidak mampu dan prestasi, semuanya diakomodir untuk bisa mendapatkan beasiswa PIP.

Sakinah bersyukur dari semua sekolah yang mereka

usulkan, ada beberapa sekolah non muslim dapatkan bantuan. Di antaranya dari Sekolah Dasar Bala Keselamatan (BK) di Kabupaten Sigi. Untuk tingkat SMP, ada juga penerima beasiswa dari SMP Kristen GPID Sumber Sari Parigi.

“Penyaluran beasiswa ini tidak ada istilah prioritas. Termasuk sekolah non muslim, jika memang dianggap berhak kami masukkan dalam daftar usulan untuk dapatkan beasiswa,” ujarnya.

Sakinah menekankan pentingnya pendidikan dalam kemajuan suatu Bangsa. Pendidikan aspek penting dalam tolak ukur berkembang atau tidaknya suatu bangsa yang biasa disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ia menjelaskan, untuk tahap I, tercatat 11.732 siswa yang menerima beasiswa PIP yang merupakan usulan aspirasi Sakinah Aljufri dari semua tingkat pendidikan, mulai SD, SMP, SMA dan SMK.

Sebarannya sesuai kabupaten, Kabupaten Sigi



1.129 orang, Banggai 240, Bangkep 106, Balut 194, Donggala 587, Morowali 659, Morowali Utara 397, Parimo 1.139, Poso 1.026, Touna 481, Tolitoli 1.377 dan Kota Palu 4.397 siswa.

Selain beasiswa PIP, Sakinah juga menyampaikan informasi, bahwa saat ini telah keluar Pengumuman Penetapan Penerima Fasilitas PP-PTS Skema A Tahun 2020 Tahun 2020 Gelombang II Perguruan Tinggi Vokasi.

Katanya, setelah dilaksanakan seleksi substansi ke-2 Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-

PTS) Gelombang II untuk perguruan tinggi vokasi, ditetapkan 27 Badan Hukum Perguruan Tinggi Penerima Fasilitas PP-PTS Skema A Tahun 2020 Gelombang II.

Untuk Sulawesi Tengah, sesuai dengan usulan yang saya sampaikan, alhamdulillah satu PTS dinyatakan berhak menerima bantuan yang nilainya hampir setengah miliar tersebut, yakni Akademi Farmasi Tadulako Farma yang dinaungi Yayasan Pharmacist Provinsi Sulawesi Tengah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Terus Bergerak untuk Kemenangan



*Galuh sebatang dibelah belah  
Diikat ikat direndam ke paya  
Para qiyadah tak boleh lelah  
Menang Pilkada PKS berjaya*

*Yaa ayyuhal qiyadah...  
Pilkada 39 hari lagi ....*

*Mari terus bergerak untuk kemenangan di  
wilayah masing masing....*

*Buat evaluasi secara rutin, lihat perkembangan  
pergerakan kita, pantau langkah langkah lawan,  
dan perhatikan situasi konstituen...*

*Berikan supervisi secara rutin, ambil langkah  
strategis yang taktis, agar kader bisa bergerak dinamis ....*

*Konsolidasikan setiap potensi yang ada,  
karena kesempatan ini tidak akan berulang.  
Mainkan semua peluang, agar kita menjadi pemenang ....*

*Terus semangat, kuatkan ikhtiar dan  
dampingi dengan doa ....*

*Jatuh taman ke kalisari  
Rebab serahi di dalam puan  
Pilkada tinggal 39 hari lagi  
Terus berjuang untuk kemenangan*

*Habib aboe*

**Habib Aboe Bakar Alhabsyi**  
Sekretaris Jendral DPP PKS

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا

إنا لله وإنا إليه مرجعنا



Keluarga besar Fraksi PKS DPR RI  
Turut berduka atas berpulangannya  
ke rahmatullah Ulama dan Tokoh Betawi

## KH. Fakhurrozi Ishaq

Semoga Allah SWT menerima amal  
ibadahnya serta Mengampuni  
segala Dosanya Amin



Momen-momen kebersamaan almarhum dengan Ketua Fraksi PKS DPR RI  
Dr. H. Jazuli Juwaini, MA





Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

**KANAL RESMI  
FRAKSI PKS  
DPR RI**

**fraksi.pks.id**



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI